

**PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN
2014 TENTANG PERDAGANGAN**
(Studi Kasus Bisnis Penimbunan Pasir Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang)



SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam ilmu syariah**

Oleh :

SEPTI AGUSTIAN

NPM : 1521030423

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H /2019 M

**PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN
2014 TENTANG PERDAGANGAN**

(Studi Kasus Bisnis Penimbunan Pasir Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam ilmu syariah**

Oleh :

SEPTI AGUSTIAN

NPM : 1521030423

Program Studi : Muamalah

Pembimbing I : Dr. Alamsyah, S.Ag., M. Ag

Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H / 2019 M

ABSTRAK

Bermuamalah merupakan transaksi jual beli antara seseorang dengan seorang atau beberapa orang lain dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara jujur, tidak ada unsur penipuan, tidak ada pihak yang dirugikan. Namun sekarang pedagang tidak sesuai dengan ajaran syari'at Islam seperti perdagangan dengan cara menimbun atau menyimpan barang (*ihthikar*) dengan tujuan agar harga barang itu mengalami lonjakan dan menjualnya ketika barang tersebut sedang langka seperti praktik penimbunan bahan bangunan yang dimaksud adalah pasir. Yang dilakukan oleh penambang pasir Gilang Jaya dan penambang pasir Rama Putra Jaya yang berada di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang dimana menjualnya ketika ketersediaan tidak ada ketika musim hujan. Penambang membeli pasir di Gunung Sugih dan Tanjung Bintang, ketika musim panas penambang membeli dan menyimpan pasirnya sebanyak-banyaknya sebagai stok untuk ketersediaan pada saat musim hujan, ketika pasir itu langka barulah menjualnya dengan harga yang lebih mahal.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Penimbunan Pasir di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang dan Bagaimana Pandangan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Bisnis Penimbunan Pasir di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bisnis penimbunan pasir bila dilihat dari hukum Islam di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang dan untuk mengetahui bagaimana bisnis penimbunan pasir bila dilihat Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan di Desa Waygalih Kecamatan Tanjung Bintang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang jelas mengenai penimbunan pasir untuk bisnis di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*) dan sistematisasi data (*sistematising*), sedangkan analisa dilakukan dengan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pemilik penambang pasir sudah lama melakukan praktik penimbunan pasir ketika musim hujan alasannya, agar mendapatkan keuntungan lebih tinggi yang memanfaatkan keadaan barang pasir yang langka dan barulah dia menjualnya dengan harga mahal. Praktik bisnis penimbunan pasir di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang apabila dilihat dalam hukum Islam dan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap bisnis penimbunan pasir adalah telah melanggar ketentuan hukum islam dan undang-undang karena melakukan perbuatan sifat *ananiyah* (egois) yang dapat merugikan orang lain menguntungkan satu pihak penjual dan merugikan masyarakat karena memanfaatkan keadaan barang yang langka dan menaikkan harga yang lebih mahal sedangkan masyarakat membutuhkannya.

MOTTO

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَكْفِيهِمْ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٩٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (QS. At-Taubah [9]: 34)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Lautan Lestari, 2010), h. 192.

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kupersembahkan kepada-Mu Tuhan yang Maha Esa, atas takdirmu kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal bagiku untuk meraih cita-citaku. Maka dari itu skripsi sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormatku tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Miskidi dan Ibunda Hayati yang telah tulus dan sabar membesarkan, membiayai, serta senantiasa tak henti-hentinya selalu mendoa'kan dalam setiap do'anya dan yang menjadikan penyamangatku untuk menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Adikku satu-satunya Ilham Nabila Yusuf terimakasih atas canda tawa dan kasih sayang, beserta keluarga besarku terimakasih atas semua doanya dan nasehat serta memberi motivasi, semangat, dan dukungan kepadaku sehingga karya ini bisa terselesaikan, dan menjadi ilmu yang berkah serta bermanfaat untukku dan semuanya. Amiin...
3. Kakaku Alm. Aris Sanjaya dan Almh. Resti Evawani terimakasih atas limpahan kasih sayang semasa hidupnya dan memberikan rasa rindu yang berarti.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu dan telah mendidikku menjadi mampu berfikir lebih maju, hingga mendapatkan gelar Sarjana.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Septi Agustian lahir di Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang pada tanggal 23 Agustus 1997 anak ke-3 dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Miskidi dan Ibu Hayati.

Menyelesaikan pendidikan dasar di :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 05 Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan lulus pada tahun 2009.
2. kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tunas Dharma Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan yang selesai pada tahun 2012.
3. lalu melanjutkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taruna Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2015.
4. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Strata Satu Prodi Muamalah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas karunia-Nya dan ridho-Nya, sehingga skripsi dengan judul “**Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus Bisnis Penimbunan Pasir Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang)**” dapat penulis selesaikan.

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (SI) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini sesuai dengan rencana, tak lupa dihaturkan terimakasih sebanyak-banyaknya. Secara rinci ucapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba Ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa/I;
3. Khoiruddin, M.S.I selaku ketua jurusan muamalah dan Juhrotul Khulwah selaku sekretaris jurusan Mu'amalah.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
TRANSLITERASI	iv
PERSETUJUAN.....	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli dalam Islam	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
4. Macam-Macam Jual Beli	23
5. Hukum Jual Beli dan Hikmahnya	28
B. Bisnis dalam Hukum Islam dan Undang-Undang.....	29
1. Pengertian Bisnis dalam Hukum Islam.....	29
2. Prinsip- Prinsip Bisnis dalam Hukum Islam.....	32
C. Hukum Bisnis dalam Undang-Undang.....	35
1. Pengertian Hukum Bisnis dalam Undang-Undang	35
2. Hukum Bisnis Bagi Pelaku Bisnis	36
D. Penimbunan Barang Dagangan dalam Hukum Islam	38
1. Pengertian Penimbunan dalam Hukum Islam	38
2. Dasar Hukum Larangan Penimbunan	41
3. Macam-Macam Penimbunan	47
4. Syarat-Syarat Penimbunan yang Dilarang	51
5. Hikmah Larangan Penimbunan yang Dilarang.....	53
E. Undang-Undang No .7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.....	54

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang.....	59
1. Sejarah Desa Waygalih Kecamatan Tanjung Bintang.....	59
2. Kondisi Geografis dan Demografis Kelurahan Desa Way GalihKecamatan Tanjung Bintang	61
3. Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang	63
4. Kondisi Pencaharian Masyarakat Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang	64
B. Praktik Penimbunan Pasir oleh Penambang Pasir Giilang Jaya Dan Rama Putra Jaya di Desa Way Galih	64

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Penimbunan Pasir Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang	74
B. Pandangan Undang-Undang Perdagangan di Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Terhadap Bisnis Penimbunan Pasir Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul: “**Pandangan Hukum Islam Dan Undang Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus Bisnis Penimbunan Pasir Di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang)**”. Untuk perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut yaitu:

Pandangan merupakan suatu hasil perbuatan memandang, memperhatikan, dan melihat.¹

Hukum Islam menurut ulama ushul fiqh adalah seperangkat peraturan berdasar kan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama islam. Maksud dari Hukum Islam disini adalah Hukum Bisnis

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 529.

Islam (Fiqh Muamalah), dimana Hukum Bisnis Islam Adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits).²

Undang-Undang adalah ketentuan dan peraturan Negara yang dibuat oleh Pemerintah.

Perdagangan adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.

Penimbunan adalah proses, cara, perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang).³

Pasir adalah butir-butir batu yang halus.⁴

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat, bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antarindividu, adanya peluang usaha untuk mempertahankan dan meningkat standar hidup dan lain sebagainya. Sehingga kepentingan bisnis akan mempengaruhi tingkah laku bagi semua tingkat individu, sosial, regional, nasional dan internasional. Dengan adanya kebutuhan masyarakat akan suatu barang atau jasa maka bisnis akan muncul untuk memenuhinya, masyarakat yang terus berkembang secara kualitatif dan kuantitatif.⁵

² Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh, jilid I, cetak I* (Jakarta :Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 529

⁴ *Ibid.*, h. 315.

⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 1

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa judul skripsi ini adalah **“Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus Bisnis Penimbunan Pasir Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang)”**. Maksud dari judul skripsi tersebut di atas adalah untuk memberikan gambaran terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yang berkaitan dengan praktek bisnis penimbunan pasir yang sudah menjadi kebiasaan oleh penjual pasir untuk menimbun pasir ketika musim hujan untuk menaikkan harganya ketika barang yang ketersediaan tidak ada.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Karena pasir merupakan bahan bangunan yang tidak dapat tergantikan oleh barang lain untuk membangun sebuah rumah, gedung-gedung, sehingga pasir sekarang merupakan salah satu bahan bangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Mengingat persoalan mengenai muamalah selalu mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman dan kemajuan pengetahuan manusia, terutama dengan masalah penimbunan pasir untuk bisnis.

2. Alasan Subjektif

- a. Tempat penelitian terjangkau oleh penulis.
- b. Judul skripsi yang diambil sangat menarik karena belum ada yang pernah membahas dan menjadi tantangan tersendiri bagi penulis.

- c. Penelitian tentang pandangan hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap bisnis penimbunan pasir merupakan permasalahan yang berkaitan dengan Program Studi Fakultas Syari'ah Universitas Raden Intan Lampung yaitu Program Studi Mua'amalah, sehingga sangat mendukung proses penelitian yang dilakukan.

C. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi persoalan dunia Islam masa kini, prinsip umum hukum Islam berlaku dimasa lampau, masa kini dan akan tetap berlaku dimasa depan.⁶ Manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka, serta kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia, manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual dalam jangka pendek dan jangka panjang seperti sandang, rumah dan kekayaan lainnya. Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak diperbolehkan termasuk dalam dunia bisnis. Dalam bisnis syariah, bisnis yang dilakukan harus berlandaskan sesuai syaria'ah. Semua hukum dan aturan yang ada dilakukan untuk menjaga pebisnis agar mendapatkan rejeki yang halal dan diridhai oleh Allah SWT serta terwujudnya kesejahteraan distribusi yang merata. Maka etika atau

⁶ Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2001), h. 27.

aturan tentang bisnis syariah memiliki peran yang penting juga dalam bisnis berbasis syari'ah. Hakikat dari bisnis dalam agama Islam selain mencari keuntungan materi juga mencari keuntungan yang bersifat immaterial. Keuntungan yang bersifat immaterial yang dimaksud adalah keuntungan dan kebahagiaan ukhrawi. Dalam konteks inilah al-Qur'an menawarkan keuntungan dengan suatu bisnis yang tidak pernah mengenal kerugian yang oleh al-Qur'an diistilahkan dengan "tijaratanlantabura". Karena walaupun seandainya secara material pelaku bisnis Muslim merugi, tetapi pada hakikatnya ia tetap beruntung karena mendapatkan pahala atas komitmennya dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan syariah. Di dalam syariat Islam terdapat ketentuan halal dan haram, yaitu apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang.⁷

Dalam firman Allah QS. An-Nisa [4]:29)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4]: 29)⁸

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 3.

⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 45.

Ayat ini menjelaskan bahwa perdagangan yang dijalani dengan cara yang tidak jujur, mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan, dan praktek-praktek lain sejenis merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Melakukan perdagangan dengan cara menimbun atau menyimpan barang (*ihhtikar*) dengan tujuan agar harga barang tersebut mengalami lonjakan itu sangat dilarang dalam Islam. Terlebih barang tersebut sedang langka, sementara masyarakat sangat membutuhkan.

Dalam undang-undang telah mengatur tentang perdagangan bahwa setiap pelaku usaha dagang memiliki aturan hukum atau juga hak dan kewajiban dalam berlaku usaha jual beli yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, agar antara penjual dan pembeli mengetahui sejauh mana batas hak dan kewajiban antara masing-masing penjual dan pembeli. Dalam pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, suatu waktu terjadi praktek penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik dan tidak menjualnya dengan harga pasar. Oleh karena itu, Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi

ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran karena harga merupakan faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar.

Dalam Islam, harga yang seharusnya berlaku dipasar yaitu harga yang adil. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Dengan demikian, Islam menjamin pasar dimana pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam rangka keadilan.⁹ Namun jika berbagai faktor yang tidak alamiah terjadi di pasar, seperti monopoli sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan atau masyarakat sangat memerlukan barang tersebut, namun pedagang tidak mau menjualnya kecuali dengan harga yang tinggi seperti praktek penimbunan bahan bangunan yang dimaksud adalah pasir.

Pasir merupakan salah satu bahan bangunan yang sampai sekarang ini masih belum tergantikan. Dengan majunya pembangunan pada masa sekarang ini, banyak rumah-rumah yang dibangun dan gedung-gedung yang sangat tinggi bermunculan. Dengan begitu kebutuhan pasir akan selalu ada. Namun dalam jual beli pasir sekarang ini, penambang pasir menimbun pasirnya dan menjualnya ketika ketersediaan tidak ada. seperti, yang dilakukan oleh penambang pasir yang ada di Desa Way Galih, yang menimbun pasirnya dan

⁹ Isnaini Harahap, Yenni Samri Julianti Nasution, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 110.

dijual ketika musim hujan. Alasannya, agar pasir yang dijual dimusim hujan mendapat keuntungan relatif tinggi dari pada harga musim panas. Dalam hukum Islam penimbunan suatu barang disebut dengan *ihtikar* yang berarti membeli sesuatu dengan jumlah besar lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka dipasaran dan harganya menjadi relatif tinggi.

Penambang pasir di Desa Way Galih membeli pasirnya di pertambangan pasir Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan Tanjung Bintang, tidak semua pasir yang dibeli itu dijual semua sebagian ada yang disimpan di gudang untuk stok dijual ketika musim hujan, dan sebagian ada yang dijual untuk dimusim panas. Ketika pasir yang disimpan dimusim hujan, penambang pasir mendapatkan keuntungan yang relatif tinggi dari pada musim panas, karena ketika musim hujan stok pasir jarang ditemukan oleh penambang. Sehingga penambang membeli pasir sebanyak-banyaknya di musim panas dan disimpan digudang sebagai stok ketersediaan pasir di musim hujan dan dijual lebih mahal dari harga pasar biasanya. Banyak konsumen yang tidak tahu tentang praktek penimbunan pasir yang dilakukan oleh penambang pasir GILANG JAYA dan RAMA PUTRA JAYA. Konsumen mengeluh harga pasir yang dijual relatif tinggi dimusim hujan, dari pada dimusim panas. Meskipun, harga Pasir relatif tinggi dari harga musim panas, konsumen tetap membeli Pasir tersebut dikarenakan kebutuhan untuk bahan bangunan.

Berdasarkan latar belakang diatas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang praktek penimbunan pasir, dengan menyimpan pasirnya digudang dan menjualnya ketika harga naik. Kemudian penulis menuangkannya dalam sebuah judul skripsi “Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan” (Studi Kasus Bisnis Penimbunan Pasir Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik bisnis penimbunan pasir di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang?
2. Bagaimana pandangan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap bisnis penimbunan pasir di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana bisnis penimbunan pasir bila dilihat dari hukum Islam di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang
- b. Untuk mengetahui bagaimana bisnis penimbunan pasir bila dilihat Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan alternatif informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan praktek bisnis penimbunan pasir.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Sebagai pendukung, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, karena penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan, data yang diperoleh sebagai data lapangan, akan dianalisa secara deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu dalam

penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik bisnis penimbunan pasir di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹⁰ Dalam hal ini data primer yang diperoleh bersumber dari pihak-pihak yang terkait dengan bisnis penimbunan pasir di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan pemersalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹¹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah penambang pasir di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang dan para konsumen yang membeli pasir, yaitu berjumlah 30 orang yang terdiri dari 2 penambang pasir dan 28 orang pihak konsumen.

¹⁰ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Kasara, 2006), h. 57.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹²

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah purposive sample. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel besar dan jauh. Pengambilan sampel dalam penelitian ini hanya berdasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.¹³ Dengan mempertimbangkan tersedianya waktu, tenaga, dan dana maka tidak memungkinkan apabila mengambil seluruh populasi yang ada. Oleh karena itu, diambil 11 orang sebagai sampel yang terdiri dari 2 orang pemilik pertambangan pasir dan 9 orang pihak konsumen yang membeli pasir. Penambangan pasir tersebut yaitu penambang Gilang Jaya dan penambang Rama Putra Jaya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung fenomena yang terjadi dilapangan.

¹² *Ibid.*, h. 119.

¹³ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Renika Cipta, 2010), h.183.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden. Wawancara dilakukan dengan penjual pasir dan pihak konsumen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen rapat, dan agenda. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada ditempat atau objek yang sedang diteliti.

5. Metode Pengolahan Data dan Metode Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data berarti menimbang menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasikan dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul tidak logis dan meragukan. Tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencacatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

2. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Sistematisasi data adalah menempatkan data sesuai kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁴

b. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁵ Dalam skripsi ini diuraikan kata-kata tertulis yang menggambarkan serta menganalisis tentang praktek bisnis penimbunan pasir di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang dalam pandangan hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap bisnis penimbunan pasir.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h.126.

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 48.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa (etimologi) dapat diartikan sebagai memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad dan saling mengganti pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) penjual dengan yang ia beri dan pembeli dengan apa yang ia ambil.¹ Kata lain dari jual beli (al-bai) adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, dalam QS. Fatir [35]: 29 yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge-rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”. (QS. Fatir [35]: 29).²

Jual beli menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

¹ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h.23.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Lautan Lestari, 2010), h. 437.

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan hukum syara'.
- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkannya).
- e. Penukaran benda dengan benda lain yaitu dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara dibolehkan.
- f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati oleh kedua belah pihak dan dapat memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.³

³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h.21.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hambanya untuk melakukan jual beli yang berdasarkan syariat islam. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۖ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah [2]: 275)⁴

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah memperbolehkan orang melakukan transaksi jual beli karena jual beli merupakan transaksi yang

⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 46.

telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam hukumnya boleh atau mubah, sedangkan Allah mengharamkan perbuatan riba dalam melakukan jual beli sebab riba merupakan suatu perbuatan yang memakan hak orang lain dan merugikan orang lain.⁵ Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (QS. An-Nisa [4]: 29)⁶

Bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara kedua belah pihak atas dasar saling suka sama suka dan rela satu sama lain dan barang yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia sehingga bangkai, minuman keras dan darah bukan termasuk sesuatu boleh diperjualbelikan karena benda-benda itu tidak ada maanfaatnya.⁷ Dan Allah SWT melarang manusia memakan harta sesama mereka secara batil, seperti cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, dan beberapa perbuatan lain

⁵ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perespektif Hadis Nabi* (Jakarta: Premadia Group, 2015), h. 158.

⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 83.

⁷ *Ibid.*, h. 157.

yang dilarang adalah termasuk kepadanya diantaranya melakukan riba atau memakan hak orang lain.

b. Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi:

عَنْ رِافِعَةَ بِنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جُلٍ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبُزَارِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)⁸

Artinya: "Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi". (HR. Al-Bazzar dan dianggap sahih Al-Hakim).

Dari hadist di atas bahwa Rasulullah sangat melarang sikap perilaku curang dalam melakukan aktivitas jual beli seperti jual beli dengan penipuan yang dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar, jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli sesuatu yang yang tidak diketahui hasilnya atau tidak bisa diserahkan dikarenakan tidak diketahui hakikat dan kadarnya seperti jual beli burung yang masih terbang di angkasa, jual beli hewan yang masih dalam kandungan induknya. Dan Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, sekaligus melaknat orang-orang yang melakukan

⁸ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min adillatil Ahkam*, Penerjemahan Achmad Sunarto, Cet. Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 305.

jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukan (khamr), babi, lemak, bangkai, berhala, dan sebagainya.⁹

a. Ijma'

Para ulama fiqh dari zaman dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu boleh-boleh dilakukan, apabila dalam jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat yang diperlakukan untuk jual beli yang terpenuhi.¹⁰ Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya untuk memberikan jalan keluar masing-masing manusia untuk memilki harta orang lain dengan jalan yang sudah ditentukan oleh hukum Islam.¹¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan transaksi jual beli, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum dan untuk mewujudkan keinginan para pihak dalam melakukan transaksi jual beli melalui pembuatan akad. Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.¹²

⁹ Idris, *Hadis Ekonomi dalam Perespektif Hadis Nabi* (Jakarta: Premadia Group, 2015), h.159.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12* (Bandung: Pustaka, 1997), h.48.

¹¹ H. M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali perss, 1991), h.144.

¹² Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin Bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Prakteknya Dipasar Modal Indonesia", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015 (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2016), h.786. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (20 juli 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu:

- 1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*). Pembeli, yaitu orang yang cakap dan dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- 2) Barang jualan, yaitu sesuatu yang dapat diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.¹³
- 3) Sighat (*Ijab Kabul*). Ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang disampaikan menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan si penjual, maupun si pembeli, sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *ijab* dan *qabul* yaitu bukan dilihat siapa dahulu yang menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memilikinyan atau persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaski menyerahkan barang lisan maupun tulisan.¹⁴

¹³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 112.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.71.

b. Syarat Jual Beli

- 1) Berakal yaitu sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu dan menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.¹⁵ Sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta dikarenakan bahwa orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil tidak sah melakukan ijab dan kabul.¹⁶
- 2) Tidak pemboros dan pailit, bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual beli tidak sah. Sebab bagi orang yang pemboros itu suka menghamburkan hartanya yang dapat dikenakan hajru (larangan melakukan transaksi terhadap harta).
- 3) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan) yaitu prinsip jual beli merupakan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan kepada pihak lain.¹⁷
- 4) Baliqh, yaitu dalam hukum islam (*fiqih*), dikatakan baliqh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi perempuan, karena transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, namun demikian bagi anak-

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.115.

¹⁶ *Ibid.*, h. 74.

¹⁷ Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h.113.

anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan jual beli, khususnya terhadap barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.¹⁸

4. Macam-Macam Jual Beli

a. Dipandang dari segi sifatnya, terbagi menjadi dua bagian yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *ghair shahih*

- 1) jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang telah memenuhi semua rukun dan syarat seperti jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukun dan maupun syaratnya tidak terkait dengan hak orang lain dan tidak ada hak khiyar di dalamnya.¹⁹
- 2) jual beli *ghair shahih*, (tidak shahih) yaitunya tidak terpenuhi atau jual beli yang salah satu atau semua rukunnya atau semua rukun jual beli tidak dibenarkan sama sekali oleh syara', jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki akal yang sempurna, tetapi barang yang dijual masih belum jelas.²⁰

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), yaitu:

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.115.

¹⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali pers, 2016), h.71.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: penerbit Amzah, 2010), h. 2011.

- 1) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.
- 2) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, para ulama baik dari kalangan hanafiyah, malikiyah, dan syafi'iyah berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan contohnya: jual beli burung yang sedang terbang di udara dan ikan yang ada di air. Jual beli ini termasuk jual beli yang batil karena tidak ada kejelasan yang pasti.²¹
- 3) Jual beli *majhul*, yaitu jual beli yang tidak jelas, seperti jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga dan jual beli salah satu rumah dari beberapa rumah tanpa menjelaskan mana rumah yang dimaksud (yang dijual).²²
- 4) Jual beli sperma (mani) binatang, seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapatkan keturunan yang baik, jual beli ini termasuk haram hukumnya.
- 5) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-qur'an), seperti: arak, babi, anjing, berhala, bangkai dan khamar adalah haram hukumnya.

²¹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.127.

²² Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 112.

- 6) Jual beli *Ma'dum* (tidak ada bendanya), yaitu jual beli terhadap sesuatu yang tidak ada atau belum ada ketika akad seperti: jual beli buah-buahan yang masih di putik yang belum jelas buahnya, anak binatang yang masih berada daam perut induknya, jual beli yang seperti ini adalah haram, karena barangnya belum ada dan tidak tampak jelas.²³
- 7) Jual beli *Muzabanah*, yaitu jual beli sesuatu yang diketahui jumlahnya dengan sesuatu yang tidak diketahui jumlah harganya jual beli seperti ini dikategorikan jual beli yang mengandung penipuan (barter yang diduga keras tidak sebanding), seperti menukar buah yang basah dengan buah yang kering.²⁴
- 8) Jual beli *Muhaqallah*, yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Jual beli ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba didalamnya (untung-untungan).
- 9) Jual beli *Mukhadharah*, yaitu jual beli yang belum pantas untuk dipanen. Jual beli ini dilarang oleh agama, karena barang tersebut masih samar (belum jelas).
- 10) Jual beli *Mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan dan kaki (memakai barang tersebut), maka orang uang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur tipuan (akal-akalan) dan

²³ *Ibid.*, h. 122.

²⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.126.

kemungkinan akan menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak.²⁵

- 11) Jual beli *Munabadzah*, yaitu jual beli yang dilakukan seperti lempar melempar, misalnya, seseorang berkata: “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”, setelah terjadi lempar melempar terjadilah transaksi jual beli.
- 12) Jual beli air, salah satu syarat jual beli adalah benda yang diperjual belikan merupakan milik sendiri. Tidak sah melakukan jual beli terhadap benda-benda yang dimiliki secara bersama oleh seluruh manusia, seperti: air, udara, dan tanah, air laut, sungai dan sumur umum tidak boleh diperjual belikan dikarenakan tergolong *mal mubah* (benda-benda bebas).²⁶
- 13) Jual beli *Muqayyadah* (barter), adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang disebut dengan ukar menukar.
- 14) Jual beli *Sharf* (*Money changer*), yaitu penukaran uang dengan uang atau tukar menukar emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan lain (emas dengan perak atau perak dengan emas) kecuali tunai dan langsung jika tidak, maka adalah riba.²⁷

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.79.

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.79.

²⁷ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, h.127.

15) Jual beli *Salam*, adalah penjualan tempo dengan pembayaran tunai.

Sayid Sabiq memberikan pengertian *salam* yaitu jual beli sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan harga (pembayaran) dipercepat (tunai).²⁸

16) Jual beli dengan cara penimbunan barang, yaitu seseorang membeli barang yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang dipasaran dan mengakibatkan peningkatan harga barang tersebut. Penimbunan yang dilakukan seperti ini dilarang karena dapat merugikan orang lain dengan kelangkaan atau kesulitan yang didapat dan harganya yang tinggi. Dengan adanya penimbunan mendapatkan keuntungan yang besar dibawah penderitaan orang lain.

c. Dilihat dari segi harga atau ukurannya, yaitu:

- 1) Jual beli *murabahah*, yaitu menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu, seperti penjual memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
- 2) Jual beli *tauliyah*, menurut istilah syara' adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.²⁹
- 3) Jual beli *wadiah*, adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 77.

²⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 174.

- 4) Jual beli *musawamah*, adalah jual beli yang biasa berlaku di mana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawarkan sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.

5. Hukum Jual Beli dan Hikmahnya

Dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah tentang muamalah, bahwa:

- a. Prinsip tentang persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi manusia itu sendiri.³⁰
- b. Bahwa berbagai macam jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya, inti artinya selama tidak ada dalil melarang suatu jenis muamalah, maka muamalah itu diperbolehkan, inilah sisi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia
- c. Dalam persoalan muamalah atau jual beli harus adanya prinsip suka sama suka (*'an taradhin*) bahwa segala aktifitas perdagangan dan jual beli tidak boleh adanya pemaksaan, penipuan kecurangan, intimidasi dan praktik-praktek lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi jual beli.³¹

Allah mensyari'atkan jual beli bukan sekedar mencari keuntungan, namun keuntungan yang diperoleh tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena semua manusia secara

³⁰ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h.79.

³¹ Idri, *Hadis Ekonomi dalam perspektif hadis nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 179.

pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak pernah terhenti-terhenti selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya, dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.³²

Adapun hikmah di syari'atkannya jual beli (muamalah) adalah ketika uang, harta dan barang perniagaan terbesar di tangan semua orang dan sisi lain orang yang membutuhkannya sangat terikat dengan si pemilik barang, sedang dia tidak mungkin memberikannya tanpa adanya ganti maka dengan jual beli tercapailah hajat dan keinginan orang-orang tersebut. Sekiranya jual beli tidak diperbolehkan, niscaya akan mendorong timbulnya tindak penasaran, perampokan, pencurian, penipuan dan pertumbuhan darah, oleh sebab itu Allah menghalalkannya.³³

B. Binis Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Bisnis Dalam Hukum Islam

Bisnis merupakan suatu aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari seperti produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang. Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang

³² *Ibid.*, h. 180.

³³ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 79.

dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan perdagangan.³⁴

Dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram), oleh karena itu Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja, bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan.³⁵ Islam melalui Rasulullah, mengajarkan bagaimana bisnis seharusnya dilakukan. Mulai dari etika berbisnis sampai penggunaan harta yang diperoleh. Kegiatan bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah SAW didasari oleh akhlak mulia dengan kejujuran dan tutur kata yang baik. Allah SWT menyuruh hamba-hambanya bahkan mewajibkan untuk mencari harta-kekayaan. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 15 yaitu:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ

وَالِيهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

³⁴ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h.3.

³⁵ Norvadewi "Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Al-Tijary*, Vol. 01, Desember 2015 (Samarinda: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Samarinda, 2016), h. 35 (on-line), tersedia di https://www.researchgate.net/publication/305884774_bisnis_dalam_perspektif_Islam_telaah_konsep_prinsip_dan_landasan_normatif (2 oktober 2019), dapat pertanggung jawaban secara ilmiah.

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. Al-Mulk [67]: 15)³⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menyuruh hamba-hambanya untuk mencari rizki yang telah Allah siapkan di bumi dengan menggunakan cara yang halal. Dalam mencari rizki, seorang muslim harus tetap mengingat Allah. Saat rizki tersebut sudah diperolehnya maka dia harus mempergunakan harta miliknya dengan benar dan baik. Fenomena yang terjadi saat ini manusia semakin egois dan individualistis dalam segala hal. Selama berbisnis mereka hanya memikirkan cara untuk mendapatkan keuntungan dan cara menghindar dari kerugian saja. Ketika keberhasilan datang pada mereka, mereka lupa bahwa harta yang mereka dapatkan hanyalah titipan dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan kelak diakhirat.

Hakikat dari bisnis dalam agama Islam selain mencari keuntungan materi juga mencari keuntungan yang bersifat immaterial. Keuntungan yang bersifat immaterial yang dimaksud adalah keuntungan dan kebahagiaan ukhrawi. Dalam konteks inilah al-Qur'an menawarkan keuntungan dengan suatu bisnis yang tidak pernah mengenal kerugian yang oleh al-Qur'an diistilahkan dengan "tjaratan lan tabura". Karena walaupun seandainya secara material pelaku bisnis muslim merugi, tetapi

³⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 437.

pada hakikatnya ia tetap beruntung karena mendapatkan pahala atas komitmennya dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan syariah.³⁷

2. Prinsip-Prinsip Bisnis dalam Islam

Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terkait erat dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Dalam hal ini ternyata sistem nilai yang berasal dari agama memberikan pengaruh yang dominan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis. maka praktik bisnis mesti mengacu prinsip-prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang universal. Setidaknya terdapat lima prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Prinsip tauhid, adalah merupakan fondasi fundamental ajaran Islam.

Pada intinya bahwa prinsip ini menegaskan bahwa Allah adalah pemilik sejati seluruh yang ada di alam semesta ini. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu, pelaksanaan bisnis seharusnya didasarkan pada konsep penyerahan diri dan menyakini bahwa semua yang diperjual belikan dalam bisnis hanyalah milik Allah semata, melaksanakan bisnis berbasis ibadah.

- b. Prinsip keseimbangan (keadilan), bahwa Allah adalah Sang pencipta seluruh yang ada di muka bumi ini, dan 'adl (keadilan) merupakan salah satu sifat-Nya. Allah menganggap semua manusia itu sama

³⁷ Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 47

(*egalitarianism*) di hadapan-Nya dan memiliki potensi yang sama untuk berbuat baik, karena yang menjadi pembeda bagi-Nya hanya tingkat ketaqwaan setiap individunya. Prinsip ini mengajarkan manusia agar dapat berlaku adil dalam segala hal, terutama dalam konteks bisnis.

- c. Tidak melakukan monopoli, bahwa manusia adalah khalifah di bumi, dengan tugasnya ini seorang manusia memiliki kebebasan dalam menentukan hal yang baik dan hal buruk dalam hidupnya. Dalam bisnis Islam kegiatan ekonomi dengan menggunakan konsep kebebasan yang dimaksud terletak pada lancarnya keluar-masuk barang, dengan adanya kebebasan yang proporsional bisnis Islam melarang adanya praktik-praktik monopoli, riba, dan kecurangan. Praktik yang dilarang dalam Islam dilakukan agar supaya manusia tetap pada jalan yang baik dengan selalu mengamalkan ajaran agama dalam setiap kegiatannya. Kehendak bebas yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam akan membawa pada kesejahteraan.³⁸
- d. Tanggung jawab, konsep tanggung jawab adalah konsep yang berkaitan dengan konsep kebebasan. Kebebasan yang dilakukan seseorang akan dimintai pertanggungjawaban, semakin luas kehendak bebas yang dilakukan maka semakin luas pula tanggung jawab moral yang akan dia jalani. Dengan adanya konsep tanggung jawab manusia akan sangat berhati-hati dengan apa yang dia lakukan karena segala perbuatan mengandung konsekuensi yang harus dijalankan. Jika konsep ini

³⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.24.

dilakukan dalam bisnis, maka manusia khususnya wirausaha muslim akan berbisnis dengan cara yang halal, dimana cara pengelolaan dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil dan mendatangkan manfaat optimal bagi semua komponen masyarakat yang secara kontributif ikut mendukung dan terlibat dalam kegiatan bisnis yang dilakukan.

- e. Jujur adalah kesamaan antara berita yang disampaikan dengan fakta atau fenomena yang ada. Sebelum menjadi rasul Allah, Nabi Muhammad adalah seorang guru Entrepreneur sukses dan profesional yang selalu mengutamakan kejujuran. Seorang wirausaha yang jujur akan menjaga timbangannya, mengatakan baik dan buruknya barang yang dia jual. Dari hubungan jual beli yang didasari oleh kejujuran atau adil kepercayaan akan muncul dengan sendirinya diantara penjual dan pembeli atau antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Kepercayaan yang dihasilkan dari ketulusan hati seseorang adalah hal paling mendasar dari semua hubungan dan termasuk dalam hal kegiatan bisnis.³⁹

Bahwa prinsip dasar yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis dalam perspektif Islam adalah bahwa praktik bisnis tersebut harus mencerminkan karakter yang mengandung nilai-nilai rohaniah bahwa segala sesuatu hanyalah ciptaan Allah memiliki pemahaman bisnis yang halal dan haram, dan berorientasi pada hasil dunia dan akhirat. Selain itu, bisnis yang dijalankan harus menghindari praktik pemberian hadiah atau komisi

³⁹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.31

dalam lobi bisnis, tidak makan riba, tidak wanprestasi, tidak suap, tidak menipu, tidak zalim dan input dalam proses serta output harus bebas dari barang dan jasa yang haram serta tidak merugikan pihak lain dalam bisnis jual beli.⁴⁰

C. Hukum Bisnis Dalam Undang-Undang

1. Pengertian Hukum Bisnis dalam Undang-Undang

Sistem perekonomian dan kegiatan bisnis yang sehat seringkali bergantung pada sistem perdagangan, bisnis, usaha yang sehat sehingga masyarakat membutuhkan seperangkat aturan yang dengan pasti dapat diberlakukan untuk menjamin terjadinya sistem perdagangan atau bisnis tersebut. Aturan-aturan hukum itu dibutuhkan karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Para pihak terlibat dalam persetujuan bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekedar janji serta iktikad baik saja.
- b. Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memenuhi janjinya.

Disinilah peran hukum bisnis tersebut. Istilah hukum bisnis sebagai terjemahan dari “*business law*”. Hukum bisnis yaitu sekumpulan perangkat hukum yang mengatur tata cara dan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan suatu bisnis. Dengan kata lain hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan

⁴⁰ *Ibid.*, h. 52.

urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Dengan telah dibuatnya hukum bisnis tersebut (peraturan perundang-undangan) imbasnya adalah hukum bisnis tersebut harus diketahui atau dipelajari oleh pelaku bisnis sehingga bisnisnya berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tidak mempraktikkan bisnis yang bisa merugikan masyarakat luas (monopoli dan persaingan usaha tidak sehat). Bagaimanapun juga adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam tergantung pada bidang bisnis apa yang sedang dijalankan. Keanekaragaman kerjasama bisnis ini tentu saja melahirkan masalah serta tantangan baru karena hukum harus siap untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang ada.⁴¹

2. Hukum Bisnis Bagi Pelaku Bisnis.

Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan. Dalam melakukan bisnis tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut, contoh hukum bisnis adalah undang-undang

⁴¹ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h.157

perlindungan konsumen (UU No. 8 tahun 1999). Dalam undang-undang perlindungan konsumen dalam pasal disebut diatur tentang kewajiban pengusaha mencantumkan label halal dan kadaluarsa pada setiap produk yang ia keluarkan.

Dengan kewajiban tersebut konsumen terlindungi kesehatannya karena ada jaminan perlindungan jika produk sudah kadaluarsa. Begitu juga dengan konsumen umat islam adanya label halal akan terjamin dari mengkonsumsi produk haram. Contoh-contoh hukum yang mengatur dibidang bisnis, hukum perusahaan (PT, CV, Firma), kepailitan, pasar modal, penanaman modal PMA/PMDN, kepailitan, likuidasi, merger, akuisisi, perkreditan, pembiayaan, jaminan hutang, surat berharga, hukum ketenagakerjaan/perburuhan, hak kekayaan intelektual, hukum perjanjian (jual beli/transaksi dagang), hukum perbankan, hukum pengangkutan, hukum investasi, hukum teknologi, perlindungan konsumen, hukum anti monopoli, keagenan, distribusi, asuransi, perpajakan, penyelesaian sengketa bisnis, perdagangan internasional/WTO, kewajiban pembukuan, dan lain-lain. Dengan demikian jelas aturan-aturan hukum tersebut diatas sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Aturan-aturan hukum itu dibutuhkan karena :

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan/perjanjian bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekadar janji serta itikad baik saja.

2. Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memenuhi janjinya.
3. Untuk itu pemahaman hukum bisnis dewasa ini dirasakan semakin penting, baik oleh pelaku bisnis dan kalangan pembelajar hukum, praktisi hukum maupun pemerintah sebagai pembuat regulasi kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha. Hal ini tidak terlepas dari semakin intens dan dinamisnya aktifitas bisnis dalam berbagai sektor serta mengglobalnya sistem perekonomian.⁴²

D. Penimbunan Barang Dagangan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Penimbunan Barang dalam Hukum Islam

Penimbunan dalam Islam disebut dengan *Ihtikar* berarti upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.⁴³ Dalam kajian ilmu fiqih *Ihtikar* bermakna menimbun atau menahan agar terjual. *Ihtikar* dalam bahasa (etimologi) berarti *al-ahtikar* berarti menahan sesuatu untuk menunggu harga naik, sedangkan dalam istilah (terminologi) berarti mengumpulkan (barang-barang) dan menahan. Menahan (menimbun) barang-barang kebutuhan pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya agar mendapat keuntungan yang tinggi terhadap barang jualanannya. upaya penimbunan

⁴² Ahmad Rajafi, *Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Printing Cemerlang, 2013), h. 49.

⁴³ Adib Bisri dan Munawwir A Fatah, *Kamus Al-Bisri Indonesia Arab-Arab Indonesia* (Malang: Pustaka Progresif, 1999), h.266.

barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga sehingga mendapatkan untung yang relatif tinggi.

Disimpulkan bahwa *ihthikar* yaitu suatu kegiatan membeli suatu dengan jumlah yang besar, agar barang tersebut jumlahnya berkurang dipasar, sehingga harga barang yang ditimbun tersebut, menjadi mahal dan pada waktu harga menjadi mahal, baru kemudian dilepas (dijual) kepasar sehingga penimbun mendapat keuntungan yang berlipat ganda, diwaktu terjadinya kelangkaan, menimbun barang-barang tersebut merupakan jenis eksploitasi manusia yang paling buruk dan dapat merugikan masyarakat yang membelinya.

Para ulama mengemukakan arti atau definisi *ihthikar* berbeda-beda sepertinya halnya yang diterangkan oleh Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani mendefinisikan *ihthikar* yaitu penimbunan atau penahanan barang dagangan dari peredarannya. Sayyid Sabiq dalam buku fiqih *as-sunnah* menyatakan *ihthikar* sebagai membeli barang tersebut berkurang dimasyarakat harganya meningkat yang mengakibatkan manusia mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga barang tersebut⁴⁴.

Imam Al-Ghazali mengartikan *ihthikar* yaitu menyimpan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan menjualannya ketika harga melonjak tinggi. Ulama Madzhab Maliki mendefinisikan *ihthikar* yaitu menyimpan barang produsen baik makanan,

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12* (Bandung: Alma'arif, 1997), h. 98.

pakaian, dan segala barang yang merusak pasar. Ulama Malikiyah mendefinisikan monopoli (*ihtikar*) dengan menyimpan barang oleh produsen baik makanan, pakaian, dan barang yang dapat merusak pasaran yang mengakibatkan melonjak harga yang tinggi.⁴⁵

Dari definisi para ulama diatas dapat dikatakan mempunyai pengertian yang sama yaitu ada upaya dari seseorang menimbun barang pada saat barang itu harganya murah untuk menunggu harga akan naik. Misalnya, pedagang gula pasir di awal bulan Ramadhan tidak mau menjual barang dagangannya, karena mengetahui bahwa pada minggu terakhir bulan Ramadhan masyarakat sangat membutuhkan gula untuk menghadapi lebaran. Dengan menipisnya stok gula dipasar, harga gula pasti akan naik. Ketika itulah para pedagang gula menjual gulanya, sehingga pedagang tersebut mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.⁴⁶ Dan dapat mengakibatkan kemudharatan bagi masyarakat karena susah mendapatkan barang yang dibutuhkan dan masyarakat harus membelinya dengan harga lebih tinggi dari harga pasar. Dalam buku qawaid fiqiyah dijelaskan bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.⁴⁷

Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam menjual, membeli dan yang menjadi keinginan hatinya, tetapi Islam menentang dengan keras sifat *ananiyah* (egois) yang mendorong sementara orang dan

⁴⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syaria* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 351.

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 159.

⁴⁷ Wahyu Setiawan, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 17.

ketamakan pribadi untuk menumpuk kekayaan atas biaya orang lain dan memperkaya pribadi, kendati dari bahan baku yang menjadi kebutuhan rakyat.⁴⁸

2. Dasar Hukum Pelarangan Penimbunan Barang dalam Islam

Menurut prinsip hukum Islam, barang apa saja yang dihalalkan oleh Allah Swt. untuk memilikinya maka halal pula untuk dijadikan sebagai objek perdagangan. Demikian hal segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya maka haram pula untuk memperdagangkannya. Namun terdapat ketentuan hukum Islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya barang tersebut halal menurut ketentuan hukum Islam, akan tetapi karena sikap dan perbuatan para pelaku atau pedagang bertentangan dengan syara' maka barang tersebut menjadi haram seperti halnya menimbun barang yang banyak dilakukan oleh pedagang yang dapat merugikan orang banyak.⁴⁹ Ini sama artinya dengan membuat sesuatu yang halal menjadi haram disebabkan diperoleh dengan cara yang curang. Jika tujuan menimbun untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih, maka keuntungan yang didapat sama dengan riba. Terdapat dasar hukum pelarangan ihtikar dan hadist sebagai berikut

⁴⁸ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Pt.Bina Ilmu, 1993), h. 353.

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 164.

a. Al-Qur'an

Dalam QS. At-Taubah Ayat 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصْذَوْنَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (QS. At-Taubah [9]: 34)⁵⁰

Ayat ini menjelaskan tentang harta benda yang diperoleh dari jalan yang batil yang mereka simpan dan ditimbun itu, kelak akan menyiksa mereka. Dan orang-orang yang menghimpun dan menyimpan emas dan perak lagi tidak menafkahkannya pada jalan Allah, yakni sesuai ketentuan dan tuntutan mereka maka mereka akan disiksa dengan siksaan yang teramat pedih. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan atas saling ridha tidak adanya keterpaksaan, saling ikhlas atau suka sama suka dan tidak mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.⁵¹

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 192.

⁵¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 110

b. Hadist

1) Sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اخْتَكَرَ حُكْرَةً يَرِيدُ أَنْ يُغْلِيَهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ (رواه احمد)⁵²

Artinya: Dan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Siapa yang menimbun suatu timbunan (barang) dengan maksud menaikkan (harga bagi) kaum muslimin, maka orang itu adalah bersalah”. (HR. Ahmad).

2) Hadist Yang Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad Dan Ibnu Majah:

وَعَنْ عُمَرَ قَلٍ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ اخْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَا مَهُمْ ضَرْبَهُ اللَّهُ بِالْجُدَامِ وَالْأَفْلَاسِ.⁵³

Artinya: “Dan dari Umar, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Saw bersabda: barang siapa melakukan monopoli atau menimbun. Untuk kepentingan orang muslimin Allah menimpakan kepadanya penyakit kusta dan keadaan jatuh miskin”. (HR. Imam Ahmad dan Ibnu Majah).

3) Hadist yang diriwayatkan oleh Ma'mar bin Abdullah dari Rasulullah

Saw:

وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا خَا طِئٌ (رواه مسلم)⁵⁴

Artinya: “Dari Ma'mar bin Abdullah dari Rasulullah Saw sabdanya: tidak menimbun melainkan orang yang berdosa”. (HR. Muslim).

⁵² Mu' Ammal Hamidy, Imron Am, dan Umar Fanany B.A, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum* (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1374), h. 1765.

⁵³ Ibnu Hamzah Al-Husaini, *Asbabul Wurud* (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 249.

⁵⁴ A. Hasan, *Tarjamah Bulughul-Maram* (Bandung: Di Ponegoro, 2011), h.358.

Dari hadist di atas secara jelas bahwa Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang menjual, membeli dan yang menjadi keinginan hatinya, Islam menentang keras sifat *ananiyah* (egois) yang dapat merugikan orang lain dan ketamakan pribadi untuk menumpuk kekayaan atas biaya orang lain untuk memperkaya pribadi kendati barang tersebut menjadi kebutuhan rakyat. Rasulullah SAW melarang sangat keras dan Allah mengancam dengan siksaan yang teramat pedih bagi si penimbun barang. Dalam Islam kegiatan perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama, agar bernilai ibadah berdasarkan kepada Al-qur'an dan hadist. Pendapat-pendapat para ulama tentang hukum penimbunan barang atau *ihthikar* yaitu:

1. Ulama Malikiyyah, *ihthikar* hukumnya haram dan harus dapat dicegah oleh Pemerintah dengan segala cara, karena perbuatan itu memberikan mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan Negara.⁵⁵ Dalam masalah *ihthikar* yang paling utama yang harus diperhatikan adalah hak konsumen, karena menyangkut orang banyak. Sedangkan hak melakukan *ihthikar* hanya merupakan hak pribadi, hak pribadi bertentangan dengan hak orang banyak, maka yang harus diutamakan adalah hak kepentingan orang banyak.
2. Mazhab Syafiiyah, berpendapat bahwa hadist yang menyatakan bahwa *ihthikar* merupakan suatu pekerjaan yang salah, mengandung pengertian

⁵⁵ *Ibid.*, h. 360.

bahwa seseorang yang melakukan *ihthikar* dengan sengaja berarti telah berbuat sesuatu pengingkaran terhadap ajaran agama, merupakan perbuatan yang diharamkan.

3. Mazhab Ulama Hanabilah, mengatakan *ihthikar* merupakan perbuatan yang diharamkan oleh syariat, karena membawa kemudharatan yang besar terhadap masyarakat. Apabila mengandung tiga unsur, yaitu:

- 1) Barang yang ditimbun harus dibeli terlebih dahulu
- 2) Barang yang dibeli, merupakan bahan makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- 3) Adanya kesulitan masyarakat untuk mendapatkan bahan makanan yang dibutuhkan.⁵⁶

4. Ulama Hanafiyah, menyatakan haram dalam menetapkan hukum *ihthikar* karena menurut mereka dalam masalah ini, terdapat dua dalil yang bertentangan, yaitu:

- 1) Berdasarkan hak milik yang dimiliki pedagang, mereka bebas melakukan jual beli sesuai dengan kehendak mereka.
- 2) Adanya larangan berbuat mudharat kepada orang lain dalam bentuk apapun. Larangan tersebut muncul disebabkan mudharat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

5. Ulama Sayyid Sabiq dalam fiqih sunnah menyatakan bahwa, para ulama sepakat mengharamkan *ihthikar* dengan tiga syarat, yaitu:

⁵⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 361.

- 1) Syarat berlakunya penimbunan adalah keberadaannya sampai batas membuat penduduk negeri kesulitan untuk membeli barang yang ditimbun, karena realita penimbunan tidak akan terjadi kecuali didalam kondisi ini seandainya belum sampai menyulitkan penduduk Negeri untuk membeli barang maka tidak akan terjadi penimbunan barang dan tidak terjadi dominasi terhadapnya supaya bisa dijual dengan harga tinggi.
- 2) Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh.
- 3) Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dia dapat menjual dengan harga yang tinggi, karena masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut.⁵⁷

Penimbunan barang adalah suatu hal terbesar dalam persaingan pasar Islam, dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia, dari barang yang ditimbun. Dimana beberapa pedagang memilih untuk menahan barang dagangannya, dan tidak menjualnya karena menunggu naiknya harga. Perilaku menimbun barang untuk menaikkan harga, tidak dapat dibenarkan baik dilihat dari sudut moral, etika, agama, perekonomian, nasional, maupun hukum perbuatan tersebut mempunyai pengaruh negatif dalam fluktuasi kemampuan persediaan dan permintaan barang.⁵⁸

30. ⁵⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 32.

3. Macam-macam Penimbunan Barang Dagangan Dalam Islam

Terdapat perbedaan kandungan definisi mengenai menimbun jenis produk yang disimpan atau ditimbun di gudang, yaitu: Menimbun jenis barang yang dibutuhkan masyarakat, dengan tujuan menjualnya ketika telah melonjak, barang itu baru dipasarkan. Akan tetapi dari jenis produksi disimpan atau ditimbun di gudang, terdapat perbedaan pendapat.

Ulama Malikiyah sebagian ulama Hanabilah, Abu Yusuf dan Ibn'Abidin keduanya pakar fiqih, Hanafi menyatakan bahwa larangan *ihthikar* tidak terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan dimasyarakat. Menurut mereka, yang menjadi *illat* (motivasi hukum) dalam larangan melakukan *ihthikar* itu adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan yang diperlukan orang.⁵⁹

Imam Asy-Syaukani tidak merinci produk apa aja yang disimpan, sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai *mutakhir* (pelaku ihtikar) menyimpan barang itu untuk dijual ketika harga melonjak. Bahkan Asy-Syaukani tidak membedakan apakah penimbunan itu terjadi ketika berada dalam keadaan pasar stabil atau tidak. Hal ini perlu dibedakan karena menurut jumhur ulama, jika sikap pedagang dalam menyimpan barang bukan untuk merusak harga pasar tidak ada larangan. Menurut Fathi at-Durani, Imam asy- Syaukani memang termasuk kedalam kelompok ulama

⁵⁹ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Op. Cit.*, h. 45.

yang mengharamkan *ihthikar* pada seluruh benda atau barang yang diperlukan masyarakat.

Sebagian ulama Hanabilah dan Imam al-Gazali mengkhususkan keharaman *ihthikar* pada jenis produk makanan saja, alasan mereka adalah yang dilarang dalam *nash* (ayat atau hadis) hanyalah makanan. Menurut mereka, karena masalah *ihthikar* menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya dan keperluan orang banyak. Maka larangan itu harus terbatas pada apa yang ditunjuk oleh *nash* saja. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah membatasi *ihthikar* pada komoditi yang berupa makanan bagi manusia dan hewan. Menurut mereka, komoditi yang terkait dengan keperluan orang banyak pada umumnya hanya dua jenis ini. Oleh sebab itu, perlu dibatasi. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah membatasi *ihthikar* pada komoditi yang berupa makanan bagi manusia dan hewan. Menurut mereka, komoditi yang terkait dengan keperluan orang banyak pada umumnya hanya dua jenis ini. Oleh sebab itu, perlu dibatasi. *Ihthikar*, menurut Fathi ad Duraini, mendefinisikan *ihthikar* dengan tindakan menyimpan, harta manfaat atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara masyarakat, Negara atau pun hewan amat diperlukan produk, manfaat atau jasa itu. Tidak saja menyangkut komoditi, tetapi juga manfaat suatu komoditi, dan pembalikan jasa dari pemberi jasa dengan syarat embargo (penyitaan sementara) yang

dilakukan para pedagang dan pemberi jasa yang membuat harga pasar tidak stabil, pada komoditi, manfaat, atau jasa itu sangat diperlukan oleh masyarakat.⁶⁰

Ihtikar tergolong kedalam perbuatan yang dilarang (haram). Seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa *ihtikar* itu hukumnya haram, meskipun telah terjadi perbedaan pendapat tentang cara menetapkan hukum itu, sesuai dengan sistem pemahaman hak yang dimiliki mazhab masing-masing. Perbedaan pendapat itu adalah sebagai berikut:

Menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, Zaidiyah, dan Zahiriyah. Menurut mereka, melakukan *ihtikar*, hukumnya haram.⁶¹ Menurut ulama Malikiyah, *ihtikar* hukumnya haram, yang harus dapat dicegah oleh pemerintah dengan segala cara supaya masalah *ihtikar* segera diatasi, karena perbuatan itu memberikan mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan Negara. Oleh sebab itu, penguasa harus segera turun untuk mengatasi kasus *ihtikar*, yang paling utama dipelihara adalah hak konsumen karena menyangkut hak orang banyak sedangkan hak orang yang melakukan *ihtikar* hanya merupakan hak pribadi. Kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan orang banyak, maka yang didahulukan adalah kepentingan orang banyak.

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa *ihtikar* merupakan suatu pekerjaan yang salah, mengandung pengertian yang dalam karena dapat

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 159.

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 86.

merugikan orang lain. Orang yang melakukan kesalahan (*al-khatha*) dengan sengaja berarti telah melakukan suatu pelanggaran terhadap ajaran syara'. Pelanggaran ajaran syara' merupakan perbuatan yang diharamkan. Oleh karena itu, perbuatan *ihthikar* termasuk kedalam salah satu bentuk perbuatan yang diharamkan oleh agama, apalagi dalam hadis itu pelakunya diancam dengan neraka.⁶² Dalam Islam keberadaan satu penjual dipasar, atau tidak adanya pesaing, atau kecilnya persaingan dipasar, bukanlah suatu hal yang terlarang. Siapapun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Jadi, monopoli dalam arti harfiah, boleh-boleh saja. Akan tetapi, siapapun dia tidak boleh melakukan monopoli (*ihthikar*) adalah mengambil keuntungan diatas keuntungan normal yang mengambil keuntungan lebih besar dari harga biasanya dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

Sesungguhnya tidak ada perbedaan para ulama tentang hukum *ihthikar* (monopoli), sebagai praktek terlarang dalam Islam. Adapun beberapa ulama yang menjelaskan *ihthikar* terbatas pada produk primer tertentu saja, pada hakikatnya menjelaskan '*illat ihthikar* adalah membahayakan hajat dan kepentingan masyarakat umum karena produk dan barang tersebut dibutuhkan oleh masyarakat umum. Maka jika saat ini monopoli itu membahayakan masyarakat, maka setiap bentuk monopoli

⁶² *Ibid.*, h.76.

diharamkan menurut seluruh ulama, karena masyarakat umum tidak lagi mendapatkan produk dan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁶³

4. Syarat-Syarat Penimbunan Barang dalam Islam

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami objek yang ditimbun yaitu: kelompok pertama mendefinisikan *ihtikar* sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok (primer), kelompok kedua mendefinisikan *ihtikar* secara umum yaitu menimbun segala barang-barang keperluan manusia baik primer maupun sekunder.⁶⁴ Ada tiga syarat dikategorikan *ihtikar*.

- a) Barang-barang yang disimpan atau ditimbun itu adalah hasil dari pembelian, jika seseorang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga yang relatif murah (normal) atau membeli sesuatu pada saat harganya melonjak (mahal) lalu si pembeli tadi menyimpannya, maka orang tersebut tidak dikategorikan sebagai penimbun (*muhtakir*).
- b) Barang-barang yang dibeli adalah barang komoditi bahan makanan pokok, sebab itu adalah kebutuhan manusia secara umum.
- c) Adanya kesulitan bagi manusia untuk membeli dan mendapatkannya dengan dua jualan:
 - a. Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan barang lantaran adanya penimbunan. Sementara daerah-daerah yang memiliki pasokan komoditi bahan makanan yang cukup banyak dan memahami, tidak

⁶³Adiwarman A. Karim, Ono Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 60.

⁶⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 359.

ada larangan, sebab secara umum hal tersebut tidak akan menimbulkan dampak yang berarti.

- b. Pada masa-masa sulit, dengan mendatangi daerah yang sedang mengalami rawan pangan dan memborong persediaan yang ada, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara daerah yang kecil dengan daerah yang besar.⁶⁵

Dari ketiga syarat diatas kesimpulannya bahwa penimbunan barang itu hanya berlaku terhadap-terhadap barang-barang hasil pembelian saja (barang-barang yang dibeli). Dengan demikian penimbunan barang hasil produksi sendiri atau barang-barang hasil harta karya sendiri tidak termasuk penimbunan, karena ada kemungkinan tidak akan mengalami kelangkaan dan juga tidak akan merusak harga pasar serta stabilitas ekonomi masyarakat.

Secara ringkas syarat yang bisa dikatakan *ihthikar* adalah pertama, obyek penimbunan adalah barang-barang kebutuhan masyarakat dan, yang kedua, tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan diatas keuntungan normal dan yang ketiga, menyulitkan dan merugikan masyarakat yang membutuhkan kemudian barang yang tersimpan adalah komoditi bahan makanan pokok yang ada dasarnya, manusia sangatlah tergantung kepada makanan. Makanan adalah suatu esensial dan menjadi kebutuhan primer dalam kelangsungan hidup dan kebutuhan manusia, agar

⁶⁵ *Ibid.*, h. 358.

ketatanan kehidupan manusia tetap terjaga dengan baik selaku khalifah Allah diatas muka bumi ini.

5. Hikmah Larangan Penimbunan Barang Dalam Islam

Imam Nawawi menjelaskan hikmah dari larangan penimbunan barang (*ihthikar*) adalah mencegah hal-hal yang menyulitkan manusia secara umum, oleh karenanya, para ulama sepakat apabila ada orang memiliki makanan lebih, sedangkan manusia sedang kelaparan dan tidak ada makanan kecuali yang ada pada orang tadi, maka wajib bagi orang tersebut menjual atau memberikan dengan cuma-cuma makanannya kepada orang yang membutuhkan supaya orang tersebut tidak mengalami kesulitan. Dan apabila ada yang menimbun selain bahan makanan seperti pakaian musim dingin dan sebagainya, sehingga manusia kesulitan mendapatkannya dan membahayakan mereka, maka hal ini dilarang dalam Islam. Islam mengharamkan orang menimbun dan mencegah harta dari peredaran. Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang pedih di hari kiamat.

Menimbun harta maksudnya membekukannya, menahannnya dan menjauhkannya dari peredaran di pasar. jika harta itu digunakan dalam usaha-usaha produktif seperti dalam perencanaan produksi, maka akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran. Kesempatan-kesempatan baru bagi pekerjaan ini bisa menambah pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga bisa mendorong meningkatnya produksi, baik itu dengan membuat rencana-rencana baru

maupun dengan memperluas rencana yang telah ada, dengan demikian, akan tercipta situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat, penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat Internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang, yang mana beberapa Negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan bahan pokok. Negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari Negara yang kurang maju perekonomiannya dan memonopoli penjualan komoditas industry.⁶⁶

E. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Indonesia mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang perdagangan. Pengertian perdagangan adalah suatu kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk mendapatkan imbalan atau kompensasi.⁶⁷ Dan mengatur seluruh aktivitas dan segala akibat hukum yang terkait dengan perdagangan, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis yang terjadi ditengah masyarakat agar berjalan dengan lancar, tertib, aman dan tidak ada pihak yang dirugikan.⁶⁸

Dalam undang-undang no. 7 tahun 2014 tentang perdagangan dibentuk untuk mengedepankan nasional dan ditujukan pada perlindungan pasar

⁶⁶ Ahmad wardi Muslich, *fiqh muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 273.

⁶⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 1.

⁶⁸ Zainal Asikin, *Hukum Dagang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 5.

domestik maupun produk dalam negeri, membuat regulasi terhadap perdagangan dalam negeri serta memberikan perlindungan terhadap konsumen. Beberapa pertimbangan dasar daripada pemerintah menyusun undang-undang ini adalah:

1. Bahwa pembangunan dibidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk menunjukkan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian Nasional yang dapat memberikan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam Negeri.
3. Bahwa peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi Nasional guna menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan yang akan berakibat pada fungsi hukum bisnis yang syariah yaitu mewujudkan konsep adil dan sesuai dalam praktek dan transaksi bisnis.

Dalam sektor pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang nomor. 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang berbunyi:

Ayat (1) “Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Ayat (2) “Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan”.

Ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting diatur dengan atau berdasarkan peraturan presiden”. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, yang sama-sama mengenai penjelasan barang kebutuhan pokok dan barang penting.⁶⁹

Presiden pada tanggal 15 juni 2015 lalu, telah menandatangani peraturan Presiden (perpres) nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Yang dimaksud barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hidup hajat orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi, serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, sedangkan barang

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Bandung: Citra Umbra, 2014), h. 18.

penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. Kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (6) nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting:

- a. Hasil pertanian: beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, dan bawang merah.
- b. Hasil industri: gula, minyak goreng, dan tepung terigu.
- c. Hasil peternakan dan perikanan: daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar (bandeng, kembung, dan tongkol/tuna/cakalang)
- d. Barang penting seperti:
 1. Benih (padi, jagung, dan kedelai)
 2. Pupuk
 3. Gas elpiji 3(tiga) kilogram
 4. Triplek
 5. Semen
 6. Besi baja konstruksi dan
 7. Baja ringan, dll

Dalam Perpres Nomor 71 tahun 2015 Pasal 11 yaitu mengatur mengenai penyimpanan barang oleh pengusaha.

Pertama, “apabila terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan hambatan lalu lintas perdagangan barang, pengusaha dilarang menyimpan

kebutuhan pokok dan barang penting didalam gudang dalam jumlah dan waktu tertentu “bunyi Pasal 11 ayat (1).

Kedua, pengusaha boleh menyimpan bahan pokok dan penting maksima 3 bulan kedepan persediaan bahan pokok dan penting tidak sampai menimbulkan kelangkaan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pada catatan rata-rata penjualan per-bulan dalam kondisi normal, berdasarkan Pasal 11 ayat (2).

Ketiga, ketentuan larangan penyimpanan pada Pasal 11 ayat (3) dikecualikan terhadap barang kebutuhan pokok dan atau barang penting sepanjang digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong untuk proses produksi dan atau distribusi.⁷⁰

⁷⁰ <https://setkab.go.id/inilah-perpres-penetapan-dan-penyimpanan-barang-kebutuhan-pokok-dan-barang-penting/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2019.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang

1. Sejarah Desa Waygalih

Desa Way Galih pada mulanya dibuka pada tahun 1918 yang mayoritas pendatang sebagai pekerja di ONDERMERING NEGERIA (PTP.N. VII UU. Kedaton pada saat ini). Setelah itu berkembang menjadi sebuah susukan (dusun saat ini) bagian dari wilayah temple (sekarang Banjar Agung). Sekitar tahun 1944 dengan kepala kampung Bapak Hadi Utomo. Pada masa Agresi Belanda ke dua kurang lebih tahun 1949 Onderneming Negeria mempunyai sebutan lain yaitu Onderneming Way Galih.

Kurang lebih tahun 1955 susukan diberi nama Hadi saroni oleh Bapak Hadi Utomo dengan kepala suku dijabat oleh Bapak Mangun Wiyono namun lebih tetap lebih dikenal dengan sebutan Wai Galih, sekitar tahun 1965 susukan Hadi Saroni berkembang menjadi kampung Wai Galih yang mengandung “DIBERI DARI HASIL PEMIKIRAN” dengan kata lain bahwa dari hasil pemikiran Bapak Hadi Utomo maka sebuah susukan Hadi Saroni menjadi kampung Wai Galih, yang wilayahnya saat itu meliputi Ladang Kidul (Desa Waigalih), Ladang Wetan (Desa Sabah Balau Dusun 2 saat ini), Ladang Kulon (Desa Sabah Balau Dusun 3 saat ini) yang dipimpin oleh penjabat kepala kampung Bapak Sudariyanto.

Sekitar tahun 1977 s/d 1979 kepala kampung berganti kepada Bapak Endysanudin saat itulah Balai Desa Wai Galih di bangun. Tahun 1979 s/d 1980 kepala kampung diganti oleh Bapak Komari Zaman Karen Bapak Endysanudin akan mencalonkan dalam pemilihan kepala kampung yang pertama dikampung Wai Galih dan terpilih sebagai kepala kampung pertama dikampung Way Galih dan terpilih sebagai kepala kampung yang pertama hasil pemilihan masyarakat yaitu Bapak Kamirin menjabat dari Tahun 1980 s/d 1989. Saat itulah nama Wai Galih berubah nama menjadi *DESA WAY GALIH* bagian Kecamatan Tanjung Bintang.¹

WAY GALIH yang berarti “*AIR YANG BAGUS*”. Karena desa Way Galih di apit 2 (Dua) sungai dan adanya bendungan peninggalan Belanda tahun 1989 s/d 1990 pejabat kepala Desa Bapak Gatot Supeni dan Desa Way Galih melaksanakan Demokrasi pemilihan kepala Desa dan terpilih kembali Bapak Kamiran jabatan kepala Desa yang ketiga dimenangkan oleh Bapak Sapuan Abadi menjabat dari tahun 1998 s/d 2007. 4 januari 2007 s/d 30 Desember 2008 kepala Desa dijabat oleh Bp. Nanang Ermanto hasil pemilihan kepala Desa Way Galih yang ke Empat. 30 Desember 2008 s/d 14 januari 2010 pjs. Kepala Desa Bapak Eli Suprpto, dan 14 januari 2010 s/d 20 september 2010 pjs. Kepala Desa di jabat Bapak Karmono, hasil PILKADES Desa Way Galih yang kelima dimenangkan oleh Ibu Winarni menjabat mulai tanggal 20 September 2010 s/d 2018.

¹ Suwarno (Kepala Desa), Dokumentasi Desa Way Galih dan Wawancara, Way Galih 05 juni 2019.

Hasil PILKADES tahun 2018 yang keenam dimenangkan oleh Bapak Suwarno sampai dengan sekarang.²

2. Kondisi Geografis Kelurahan Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang

Desa Way Galih termasuk Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan luas tanah 1.399,36 ha. Kepadatan penduduk sudah mencapai 8.038 orang jiwa penduduk tetap. Letak geografis Desa Way Galih berada di wilayah barat dari kecamatan Tanjung Bintang , wilayah selatan Kabupaten Lampung Selatan. Mata pencarian masyarakat Desa Way Galih adalah petani, PNS, buruh, buruh bangunan, karyawan sebuah perusahaan swasta, pedagang, guru, TNI, bidan dan perawat di Desa Way Galih kebanyakan masyarakatnya bertani berdagang dirumah, dipasar atau keliling, namun hasil berdagang tersebut belum cukup memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, kendalanya adalah masyarakat masih belum mengerti tentang berdagang yang baik dan benar walaupun ada yang berhasil tapi belum tau mana batasan yang boleh dalam jual beli menurut hukum Islam. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan Tanjung Bintang terdekat sejauh 5 km selama 3 jam jika menggunakan kendaraan bermotor. Jarak ke Ibu Kota ke Kabupaten sejauh 60 Km selama 2 jam menggunakan kendaraan bermotor.³ Adapun kedaan demografis Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang:

a. Batas Wilayah Desa

Sebelah Utara : Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung

Sebelah Selatan : Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang

² *Ibid.*,

³ Arsip Desa Way Galih tahun 2017.

Sebelah Barat : Desa Harapan Jaya Kecamatan Sukarame

Sebelah Timur : Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang

b. Luas Wilayah Desa

- Pemukiman 175 ha
- Pertanian Sawah Tadah Hujan 184,51 ha
- Ladang/Tegalan 1016,38 ha
- Perkantoran 3 ha
- Sekolah 3,6 ha
- Jalan 18 ha
- Lapangan Sepak Bola 4 ha

Table 1
Jumlah sumber daya manusia yang ada di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang
Kabupaten Lampung Selatan

No	Uraian	Keterangan
1.	Laki-laki	4015 orang
2.	Perempuan	4022 orang
3.	Kepala Keluarga	2676 kk

No	Uraian	Keterangan
1.	Jumlah penduduk tahun ini	8835 orang
2.	Jumlah penduduk tahun lalu	7816 orang

Sumber: format laporan profil Desa dan Kelurahan Desa Way Galih Kecamatan
Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

Dengan luas wilayah Desa Way Galih, luas pemukiman 175 ha, luas pertanian 184,51 ha, lading tegalan 1016,38 ha, perkantoran 3 ha, sekolahan 3,5 ha, jalan 18 ha, lapangan sepak bola 4 ha. selain jumlah luas.⁴ Tenaga kerja yang sesuai umur atau usia sebagai berikut:

- a. Penduduk usia 18-56 tahun: 3.908 orang

⁴ Profil Desa Way Galih, *Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan*, Bag. Potensi Sumber Daya Alam (luas wilayah menurut penggunaan).

- b. Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja: 2.951 orang
- c. Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak bekerja atau belum bekerja: 953 orang
- d. Penduduk usia 0-6 tahun: 481 orang
- e. Penduduk usia sekolah 7-18 tahun: 2.240 orang
- f. Penduduk usia 56 tahun keatas: 904 orang
- g. Angkatan kerja: 1.269

Mayoritas penduduk masyarakat Desa Way Galih beragama Islam dengan jumlah 8034 orang.⁵

3. Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang

Table 2
Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

No	Nama pendidikan	Jumlah Sekolah	Lokasi/Dusun
1.	Tk/PAUD	4	2A,V.A, I.B
2.	SD/MI	5	I.B, IV,V.B,VI.A
3.	SMP/MTs	1	II.A
4.	SMA/MA	-	-
5.	Lain-lain	-	-

Sumber: format laporan profil Desa dan Kelurahan Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

4. Kondisi Pencarian Masyarakat Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang

Table 3
Sektor mata pencarian masyarakat di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

No	Jenis Pekerjaan	JUMLAH
1.	PETANI	1715
2.	PEDAGANG	855
3.	PNS	35

⁵ Profil Desa Way Galih, *Daftar Isian Potensi Desa Dan Kelurahan*, Bag.Potensi Sumber Daya Alam (tenaga kerja).

4.	TUKANG	811
5.	GURU	40
6.	BIDAN	2
7.	PERAWAT	12
8.	TNI/POLRI	7
9.	ANGKUTAN/SOPIR	68
10.	BURUH	809
11.	PENSIUNAN	114
12.	JASA PERSEWAAN	768
13.	SWASTA	111

Sumber: Data Desa Way Galih, di catat tanggal 12 juni 2019

Dari 13 sektor mata pencarian Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan bahwa pertanian yang lebih tinggi tingkat pencariannya dibandingkan dengan lainnya dan mata pencarian yang kedua adalah berdagang sedangkan yang menempati posisi terendah ada 3 sektor yaitu bidan, perawat, dan TNI.⁶

B. Praktik Penimbunan Pasir Untuk Bisnis di Desa Way Galih

Pekerjaan berdagang atau jual beli adalah sebagian dari pada kegiatan bisnis. Berdagang merupakan suatu aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambahan melalui penyerahan jasa, barang yang sehingga dalam pengelola barang dan keuntungan dari hasil berdagang tergantung apa yang dilakukan . Dalam konteks perdagangan, berdagang dipahami sebagai upaya memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya (modal). Harga ditentukan oleh pasar, membiarkan harga berlaku menurut alamiahnya, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang pedagang tidak menjual dagangannya dengan kezaliman yang harganya naik karena banyaknya orang yang meminta barang tersebut. Jika berbagai faktor yang tidak alamiah terjadi dipasar, seperti monopoli sehingga masyarakat kesulitan memenuhi

⁶ Profil Desa Way Galih, *Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan*, Bag. Potensi Sumber Daya Alam (Kondisi Ekonomi)

kebutuhan atau masyarakat sangat memerlukan barang tersebut, namun pedagang tidak mau menjualnya kecuali dengan harga yang tinggi seperti praktek penimbunan bahan bangunan yang dimaksud adalah pasir.

Pasir merupakan salah satu bahan bangunan yang sampai sekarang ini masih belum tergantikan. Dengan majunya pembangunan pada masa sekarang ini, banyak rumah-rumah yang dibangun dan gedung-gedung yang sangat tinggi. Pasir yang digunakan untuk pembangunan biasanya berukuran sangat kecil, mulai dari 0,5 mm hingga 2 mm. biasanya pasir tersebut dicampur dengan semen atau bahan lainnya untuk penggunaannya. Hampir seluruh bagian rumah dan gedung lainnya membutuhkan pasir yang sangat banyak ketika ingin membangun rumah atau gedung dengan begitu kebutuhan Pasir akan selalu ada.⁷ Namun, menemukan harga pasir yang sesuai dengan pasar sangatlah sulit apalagi jika musim hujan penambang menaikkan harga jual pasir yang begitu mahal dikarenakan barang pasir susah ditemukan. Oleh karena itu, dalam jual beli Pasir sekarang ini, Penambang Pasir menimbun Pasirnya dan menjualnya ketika ketersediaan tidak ada.

Adapun jenis-jenis pasir dan harganya yaitu:

PRODUK	SATUAN	HARGA
Pasir putih rangkas	Colt diesel	Rp. 250.000
	Pick up	Rp. 570.000
	Truk	Rp. 1.450.000
Pasir hitam cor	Colt diesel	Rp. 250.000
	Pick up	Rp. 750.000
	Truk	Rp. 2.200.000
Pasir extra beton	Colt diesel	Rp. 285.000
	Pick up	Rp. 575.000
	Truk	Rp. 2.300.000
Pasir lampung	Colt diesel	Rp. 290.000

⁷ <https://www.sejasa.com/blog/daftar-harga-pasir-terbaru/> diakses pada tanggal 12 juli 2019

	Pick up	Rp. 550.000
	Truk	Rp. 1.800.000
Pasir mundu	Colt diesel	Rp. 245.000
	Pick up	Rp. 595.000
	Truk	Rp. 2.950.000

Harga pasir bisa berubah sewaktu-waktu. Selain itu harganya sangat di pengaruhi oleh lokasi memesan pasir dan harga satuannya.

Dalam penelitian ini ada 2 objek penelitian yaitu penambang pasir GILANG JAYA dan Penambang pasir RAMA PUTRA JAYA yang ada di desa Way Galih Kecamatan Lampung Selatan.

a. Penambang Pasir Gilang Jaya

Pada tahun 2009 telah berdiri salah satu penambang pasir di daerah Desa Way Galih berada di Dusun ke daton VII yang dimiliki oleh Bapak Heri. Awal mulanya merupakan pekerja mekanik disebuah perusahaan bengkel dan juga pernah menjadi sopir angkot selama 10 tahun dari hasil bekerja dia mempunyai modal Rp.1.100.000 dengan 2 mobil pick up dan melihat peluang usaha yang belum ada di Desa Way Galih. Seperti jual beli pasir, batu bata dan genteng. Sehingga sudah mempunyai karyawan 17 orang, 6 orang pengangkut barang pasir dan 9 pekerja ada di pembuatan batu bata dan sisanya membantu pekerjaan yang lain.

Bapak Heri membeli pasir di Penambang pasir Gunung Sugih dan Tanjung Bintang dengan harga mulai dari satu mobil colt diesel Rp.200.0000-Rp.500.000 dan di jual dengan harga Rp.450.000-Rp. 625.000 kepada pembeli berdasarkan kualitas pasirnya. Bapak heri juga menjual pasirnya dengan mobil fuso dengan harga Rp.3.500.000 per-mobil fuso bisa memuat 6 mobil colt diesel, jika dijual dengan menggunakan mobil colt diesel 1 mobil colt diesel keuntungannya lebih

besar dari pada dengan mobil fuso keuntungannya mencapai Rp.300.000 per-mobil colt diesel berdasarkan dengan jenis pasir yang dijual karena harganya pun berbeda, Bapak Heri menjualnya dari mobil colt diesel, pik up, truk dan mobil fuso berdasarkan kemauan konsumen. Namun, barang pasir belum tentu selalu ada dengan kendala ketika musim hujan barang pasir sulit ditemukan dipenambang Gunung Sugih Lampung Tengah dan Tanjung Bintang jika barang pasir tidak ada, penambang Gilang Jaya membelinya ketika musim panas dengan menyimpan pasirnya sebanyak-banyaknya. Ketika ketersediaan pasir tidak ada dan langka barulah Penambang Gilang Jaya menjualnya dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar.⁸

b. Penambang Rama Putra Jaya

Penambang Rama Putra Jaya berdiri pada tahun 2013 yang dimiliki oleh Bapak Sutat yang berada di Dusun VA Desa Way Galih. Bapak Sutat merupakan lulusan dari SMK. Selain bisnis jual beli pasir, dia mempunyai pekerjaan sampingan yaitu seorang penjahit baju, jual beli pasirnya tidak sebesar penambang Gilang Jaya. Penambang Rama Putra Jaya mengambil barang pasirnya di Gunung Sugih. Dia memiliki karyawan sebanyak 10 orang pekerja untuk membantu dagangannya Bapak Sutat hanya menjual pasir, genteng dan batu split. Di penambang Rama Putra Jaya harga pasir 1 mobil truk dijual seharga Rp.2.100.000. Jika dijual pasir menggunakan mobil colt diesel harganya Rp.450.000, untuk daerah Desa Way Galih, jika diluar Desa Way Galih bisa mencapai harga Rp.700.000 per-colt diesel

⁸ Wawancara dengan Bapak Heri selaku pemilik penambang pasir Gilang Jaya di Desa Way Galih, pada tanggal 23 juli 2019.

karena jarak tempuhnya dalam transportasinya dan tergantung dengan jenis pasir karena harganya pun berbeda, Bapak Sutat hanya menjual pasir dengan ukuran mobil colt diesel, pick up, dan truk.

Menurut Bapak Sutat, dalam jual beli pasir pasti ada kendala yang dihadapi yaitu ketika musim hujan barang pasir itu jarang ditemukan dipenambang Gunung Sugih lampung tengah. Dikarenakan, intensitas penambang pasirnya umumnya menurun pada saat musim penghujan. Akibatnya, kendala kerja yang dihadapi lebih besar, ketersediaan pasir yang siap jualpun menurun dikarenakan intensitas penambang juga menurun, kondisi ini akan menyebabkan harga jual pasir lebih mahal dibandingkan musim kemarau. Oleh karena itu, penambang Rama Putra Jaya membeli pasirnya di musim panas sebanyak-banyaknya untuk stok ketersediaan ketika musim hujan. Jika barang itu tidak ada maka barang pasir itu dijual dengan harga yang lebih mahal, keuntungannya dimusim hujan pun mencapai dua kali lipat-enam kali lipat dari harga beli musim panas dan Rama Putra Jaya menjualnya jika barang pasir itu sudah langka dipasaran, Bapak Sutat mengakui jika keuntungan jual beli pasir itu ketika musim hujan karena harganya lebih mahal dari harga pasar.⁹ Beberapa wawancara kepada konsumen sebagai berikut:

Menurut Bapak Suparman yang tinggal di Desa Way Galih selaku pembeli bahan bangunan, mengeluh dengan harga pasir ketika musim hujan. Alasannya, susah untuk mendapatkan barang pasir untuk pembangunan rumahnya. Harganya yang lebih mahal dan kualitas pasir

⁹ Wawancara dengan Bapak Sutat selaku pemilik penambang pasir Putra Jaya di Desa Way Galih, pada tanggal 23 Juli 2019.

pun tidak sebgus musim kemarau. Bapak Suparman pernah kesulitan mendapatkan pasir dikarenakan langka dipasaran namun ada juga menjualnya dengan harga yang lebih mahal dari harga normal atau harga pasar biasanya.¹⁰

Menurut Bapak Supriyanto yang tinggal di Desa Waygalih yang membeli bahan bangunan di Gilang Jaya, membeli bahan bangunan untuk membangun rumahnya. Dia membeli pasir untuk kebutuhan pengecoran rumahnya yang sedang di renovasi Bapak Supriyanto membeli di Gilang Jaya, lebih dekat dari rumahnya sehingga tidak teralalu mahal untuk biaya tranportasinya. Bapak Supriyanto mengeluh dengan harga pasir jika musim hujan lebih mahal dua kali lipat dibandingkan musim panas, mau tidak mau dia membeli pasir di Gilang Jaya karena jika membeli diluar Desa lebih mahal dan ditambah biaya transportasinya yang biasanya harga pasir dari mulai Rp.600.000-Rp.1.500.000 satu mobil pick up namun jika musim hujan mecapai 2.500.000 per-pick up.¹¹

Bapak Hambali pernah membeli pasir di Gilang Jaya untuk kebutuhan memperbaiki pagar rumahnya dia membeli pasir Gilang Jaya karena terjangkau dari rumahnya, sehingga cepat pengiriman barangnya. Dia membeli ketika harga pasir mahal, dia mengatakan bahwa harga pasir naik relatif tinggi dari harga biasanya, ketika musim hujan pasirnya harga jual lebih mahal dan barangnyapun sedikit, dia membeli dengan 1 mobil

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Suparman selaku selaku pembeli penambang pasir Gilang Jaya di Desa Way Galih, pada tanggal 25 Juli 2019.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Supriyanto, pembeli pasir di penambang pasir Gilang Jaya pada tanggal 25 juli 2019

colt diesel dengan harga Rp.250.000 jika musim hujan mencapai Rp.800.000-900.000¹²

Bapak Samin pernah membeli pasir dengan Penambang Gilang Jaya sering mengeluh dengan harga ketika musim hujan, harga pasir melonjak tinggi yang harganya pasir jenis pasir Lampung pertruk Rp.1.800.000 ketika musim hujan pasir Lampung mencapai harga Rp.2.500.000 bahkan pernah mencapai Rp.3.250.000. Alasannya, mereka menjual lebih mahal karena barang stok pasir jarang ditemukan dan susah untuk dicari dipenambang Gunung Sugih dan penambang Tanjung Bintang dengan begitu Penambang Gilang Jaya menaikkan harga yang lebih mahal.¹³

Menurut Bapak Suntoro, harga pasir ketika musim hujan sangat melambung tinggi harganya dibandingkan dengan harga biasanya bapak Suntoro merupakan pekerja borongan bangunan. Dia sering membeli bahan bangunan seperti semen batu split, genteng, batu bata, pasir bahkan kayu untuk bahan pembangunan gedung sekolah, pagar rumah atau pembangunan rumah namun dia sudah berlangganan membeli pasirnya di Gilang Jaya dengan jenis pasir mundu, pasir rangkas, pasir lampung. Dari harga 1 mobil colt diesel dengan harga Rp.285.000-Rp.400.000, sesuai dengan kualitas pasirnya. Jika musim hujan Bapak Suntoro mengeluh dengan harga lebih mahal dari harga biasanya yang harga jenis pasir

¹² Wawancara dengan Bapak Hambali, pembeli pasir di penambang pasir Gilang Jaya pada tanggal 25 juli 2019.

¹³ Wawancara dengan Bapak Samin, pembeli pasir di penambang pasir Gilang Jaya pada tanggal 25 juli 2019.

mundu seharga Rp.2.950.000 pertruk musim hujan mencapai Rp.3.750.000.¹⁴

Hal serupa yang disampaikan oleh Bapak Iwan, pembeli di Rama Putra Jaya, sering membeli bahan bangunan bukan hanya pasir tetapi batu bata, semen, batu split, dia membeli pasir di penambang Rama Putra Jaya untuk kebutuhan pembangunan rumahnya karena membeli disitu lebih dekat dengan lokasi pembangunannya, dia membeli pasir dengan jenis pasir mundu karena terbilang cukup baik kualitasnya dengan harga yang relatif murah dengan harga 1 mobil codisel Rp.315.000 namun karena dengan musim hujan bapak iwan membeli lebih mahal sampai Rp.700.000-Rp.850.000.¹⁵

Ibu Siti Rohayina yang tinggal didusun 1A merupakan pembeli dari Penambang Rama Putra Jaya untuk bahan pengecoran rumahnya. Sering membeli jenis pasir hitam cor, karena bagus untuk pengecoran rumahnya. Namun, Ibu Siti Rohayina mengeluh kenapa setiap musim hujan harga pasir selalu melonjak tinggi harganya lebih mahal dari harga biasanya barangnya sedikit tapi harga mahal. Namun, Ibu Siti Rohayina tetap membelinya walaupun harga pasir melonjak tinggi jika dia membeli pasir diluar Desa Way Galih harganya lebih mahal ditambah dengan biaya transportasinya. Ibu Siti Rohayina membeli pasir yang biasanya dengan

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Sunoro, pembeli pasir di penambang pasir Gilang Jaya pada tanggal 25 juli 2019.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Iwan, pembeli pasir di penambang pasir Rama Putra Jaya pada tanggal 25 juli 2019.

harga Rp.250.000 1mobil condiselnya, jika musim hujan sampai Rp.700.000-750.000.¹⁶

Ibu Rita Mutia Ningsih selaku pembeli di penambang Rama Putra Jaya, walaupun tidak sering membeli disitu karena pasirnya mahal dan jauh dari rumahnya dan barang pasirnya pun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kualitas pasirnya jelek bercampur dengan ampas pasir atau lumpur sehingga akan mengalami retak-retak dan tiang yang kita cor pun akan belah akibat pasirnya yang berkualitas jelek. walaupun lebih mahal harga pasir tersebut, ibu Rita membelinya dikarenakan membeli dipenambang lain pasirnya jarang ada barang pasir jika terjadinya musim hujan.¹⁷

Ibu Erayani bertempat tinggal di Desa Way Galih yang merupakan warga yang dekat dari penambang Rama Putra Jaya. Ibu Erayani merupakan konsumen yang sering membeli bahan bangunan bukan hanya pasir. Namun, segala peralatan bahan bangunan dia sering membeli di Rama Putra Jaya untuk membangun rumahnya, waktu itu harga pasir murah jika barang banyak dan kualitasnya pun bagus namun semakin kesini harga pasir yang dijual melonjak tinggi. Karena, alasannya musim hujan barangnya jarang ada dan stok pasir yang ada di Gunung Sugih pun jarang ditemukan, oleh karena itu penambang Rama Putra Jaya menaikkan harganya barang sedikit namun harganya melambung tinggi yang harganya pasir itu dari Rp.250.000 tapi ketika musim hujan mencapai

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Siti Rohayina, pembeli pasir di penambang pasir Rama Putra Jaya pada tanggal 26 juli 2019.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Rita mutia ningsih, pembeli pasir di penambang pasir Rama Putra Jaya pada tanggal 26 juli 2019.

Rp.700.000-Rp.800.000 1 mobil colt diesel. Ibu Erayani mengeluh dengan harga pasir itu melambung sangat tinggi jika musim hujan dan susah dicari di penambang lainnya jika ingin membutuhkan pasir untuk kebutuhan pembangunan rumah.¹⁸

Penambang pasir menaikkan harga pasir, alasannya barang pasir jarang ditemukan dimusim hujan padahal penambang sudah membelinya jauh-jauh hari sebelum pasir itu langka untuk ketersediaan jika musim hujan. Dalam hukum islam penahanan atau penimbunan (*ihthikar*) suatu barang dengan tujuan untuk menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan yang relatif tinggi dengan membeli suatu barang dengan jumlah yang besar, agar barang tersebut jumlahnya berkurang dipasar, sehingga harga barang yang ditimbun tersebut menjadi mahal.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Erayani, pembeli pasir di penambang pasir Rama Putra Jaya pada tanggal 26 juli 2019.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Penimbunan Pasir di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur tentang seluruh aspek kehidupan termasuk dalam bermuamalah. Orang-orang Islam telah diberi kekuasaan oleh Allah SWT untuk bergiat dalam hal perdagangan dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan juga tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukan perdagangan. Di dalam syariat Islam terdapat ketentuan halal dan haram seperti melarang manusia memakan harta sesama mereka secara batil, seperti cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, dan beberapa perbuatan lain yang dilarang adalah termasuk kepadanya diantaranya melakukan riba atau memakan hak orang lain.

Allah SWT, memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun sekarang pedagang tidak sesuai dengan syari'at Islam dimana pedagang menimbun atau menyimpan barang (*ihthikar*) dengan tujuan agar harga barang tersebut mengalami lonjakan itu sangat dilarang dalam Islam. Terlebih barang tersebut sedang langka, sementara masyarakat sangat membutuhkan.

Sabda Rasulullah SAW yaitu:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اخْتَكَرَ
حُكْرَةً يَرِيدُ أَنْ يُغْلِي بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ (رواه أحمد)

Artinya: Dan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Siapa yang menimbun suatu timbunan (barang) dengan maksud menaikkan (harga bagi) kaum muslimin, maka orang itu adalah bersalah”. (HR. Ahmad).

Harga merupakan faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Dalam Islam, harga yang seharusnya berlaku dipasar yaitu harga yang adil. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Namun, jika berbagai faktor yang tidak alamiah terjadi dipasar, sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan atau masyarakat sangat memerlukan barang tersebut, namun pedagang tidak mau menjualnya kecuali dengan harga yang tinggi seperti praktek penimbunan bahan bangunan yang dimaksud adalah pasir.

Pasir merupakan salah satu bahan bangunan yang sampai sekarang ini masih belum tergantikan. Namun, dalam jual beli pasir sekarang ini, penambang pasir menimbun pasirnya dan menjualnya lebih mahal ketika ketersediaan tidak ada. seperti, yang dilakukan oleh penambang pasir GILANG JAYA dan RAMA PUTRA JAYA Kecamatan Tanjung Bintang yang merupakan penambang pasir yang berada di Desa Way Galih, yang menimbun Pasirnya untuk stok ketersediaan ketika musim hujan. Alasannya, agar pasir yang dijual dimusim hujan mendapat keuntungan relatif tinggi dari

pada harga musim panas, dikarenakan, intensitas penambang pasir umumnya menurun saat musim penghujan. Akibatnya, kendala kerja yang dihadapi lebih besar, ketersediaan pasir siap jualpun menurun dikarenakan intensitas penambang juga menurun, kondisi ini akan menyebabkan harga jual pasir lebih mahal dibandingkan musim kemarau. Oleh karena itu, penambang pasir membeli pasirnya di musim panas sebanyak-banyaknya untuk stok ketersediaan ketika musim hujan. Jika pasir itu langka maka barang pasir itu dijual dengan harga yang lebih mahal, keuntungannya dimusim hujan pun mencapai dua kali lipat-enam kali lipat dari harga beli musim panas. Ini sama artinya dengan membuat sesuatu yang halal menjadi haram disebabkan diperoleh dengan cara yang curang.

Syarat yang bisa dikatakan penimbunan (*ihthikar*) adalah pertama, obyek penimbunan adalah barang-barang kebutuhan masyarakat dan, yang kedua, tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan diatas keuntungan normal dan yang ketiga, menyulitkan dan merugikan masyarakat yang membutuhkan kemudian barang yang tersimpan adalah komoditi bahan makanan pokok yang ada dasarnya, manusia sangatlah tergantung kepada makanan. Oleh sebab itu, kemudharatan yang menimpa orang banyak bukan terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang diperlukan orang.

Sebagaimana dari hasil wawancara pada para konsumen, mereka mengeluh dengan harga pasir yang lebih mahal dari harga biasanya dimana harga pasir biasanya dengan harga Rp.250.000-Rp.350.000 satu mobil colt

diesel berdasarkan jenis pasir dan kualitasnya, namun jika musim hujan satu mobil colt diesel seharga Rp.700.000-Rp.850.000 alasannya, jika musim hujan barang pasir susah ditemukan di penambang Gunung Sugih dan Penambang Tanjung Bintang. Padahal penambang Gilang Jaya dan Penambang Rama Putra Jaya sudah membelinya jauh-jauh hari untuk stok ketersediaan ketika musim hujan. Namun, dia tetap menjualnya lebih tinggi dari modal yang ia beli dengan memanfaatkan barang pasir yang susah ditemukan akibatnya masyarakat membelinya dengan harga yang lebih mahal.

Pedagang memilih menahan dagangannya, dan tidak menjualnya karena menunggu naiknya harga akibat dari penimbunan dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran dan permintaan sehingga menimbulkan sedikit beredar barang dimasyarakat dan harga yang lebih tinggi seperti yang dilakukan oleh Penambang Gilang Jaya dan Penambang Rama Putra Jaya di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan, menggambarkan suatu transaksi jual beli yang tidak baik, tidak jujur dalam jual beli yang dapat merugikan pihak konsumen. Dimana penambang pasir membeli pasirnya dengan harga yang murah ketika musim panas. Namun, dijual dimusim hujan dengan harga dua kali lipat-lima kali lipat dari harga yang dia beli.

Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah Ayat 34:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (QS. At-Taubah [9]: 34)

Ayat ini menjelaskan tentang harta benda yang diperoleh dari jalan yang batil yang mereka simpan dan ditimbun itu, kelak akan menyiksa mereka. Dan orang-orang yang menghimpun dan menyimpan emas dan perak lagi tidak menafkahkannya pada jalan Allah, yakni sesuai ketentuan dan tuntutan mereka maka mereka akan disiksa dengan siksaan yang teramat pedih.

Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan atas saling ridha tidak adanya keterpaksaan, saling ikhlas atau suka sama suka dan tidak mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Islam menentang keras sifat *ananiyah* (egois) yang dapat merugikan orang lain dan ketamakan pribadi untuk menumpuk kekayaan atas biaya orang lain untuk memperkaya pribadi kendati barang tersebut menjadi kebutuhan rakyat.

Dalam Islam bahwa prinsip dasar yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis dalam jual beli adalah bahwa praktik bisnis tersebut harus

mencerminkan karakter yang mengandung nilai-nilai rohaniyah bahwa segala sesuatu hanyalah ciptaan Allah memiliki pemahaman bisnis yang halal dan haram, dan berorientasi pada hasil dunia dan akhirat. Selain itu, bisnis yang dijalankan harus menghindari praktik pemberian hadiah atau komisi dalam lobi bisnis, tidak makan riba, tidak wanprestasi, tidak suap, tidak menipu, tidak zalim dan input dalam proses serta output harus bebas dari barang dan jasa yang haram serta tidak merugikan pihak lain dalam bisnis jual beli.

B. Pandangan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Bisnis Penimbunan Pasir di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang

Dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dibentuk untuk mengedepankan nasional dan ditujukan pada perlindungan pasar domestik maupun produk dalam negeri, membuat regulasi terhadap perdagangan dalam negeri serta memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Dalam sektor pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yang terdapat dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang nomor.7 tahun 2014 tentang perdagangan yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, suatu waktu terjadi praktek penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik dan tidak menjualnya dengan harga pasar. Oleh karena itu, Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa

para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu, dalam praktek penimbunan pasir untuk bisnis sengaja menahan pasirnya untuk stok ketika langka dan dapat dijual dengan harga lebih tinggi.

Ketidak jujuran yang dilakukan oleh para penambang pasir menggambarkan suatu transaksi jual beli yang tidak baik dan tidak bersih baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundangan yang berada di Negara kita Indonesia. Dalam praktek penambang pasir di Desa Way Galih yang menyimpan pasirnya untuk persediaan dan dijual ketika barang pasir itu langka sehingga harga yang dia beli diawal dinaikkan dua kali lipat hingga lebih untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Perbuatan ini tidak sesuai dengan transaksi jual beli yang seharusnya dikehendaki oleh agama Islam dan peraturan perundang-undangan di Negara indonesia. Dan mengakibatkan kelangkaan dan harga jual pun lebih mahal, sedangkan jual beli yang dianjurkan dan dikehendaki Islam adalah jual beli yang didasari atas suka sama suka antara kedua belah pihak dan tidak merugikan satu pihak untuk kepentingan pribadi.

Dalam hal ini Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Oleh karena itu, Para pedagang

wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran, disamping wajib menjual barang dagangannya, apabila melanggar dapat juga dikenakan sanksi hukum.

Dengan adanya praktek bisnis penimbunan pasir yang dilakukan Penambang Gilang Jaya dan Rama Putra Jaya merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan undang-undang perdagangan dalam melakukan jual beli karena penambang melakukan tindakan yang curang sebelum melakukan jual beli yang dapat merugikan masyarakat. Penambang menunggu melonjaknya harga naik ketika harga naik barulah menjual barangnya dengan harga yang mahal untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan memanfaatkan keadaan barang yang langka dipasaran sehingga merugikan masyarakat. Masyarakat lebih mengeluarkan banyak uang untuk membeli barang yang dibutuhkan. Maka dari itu pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberantas dengan melakukan pengawasan pasar, gerebek gudang penyimpanan barang dagangan dan melakukan penindakan hukum apabila pedagang telah melakukan pelanggaran dalam bisnis jual beli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian mengenai “Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Bisnis Penimbunan Pasir Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang” dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik bisnis penimbunan pasir di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang, penambang membeli pasir sebanyak-banyaknya ketika musim panas untuk stok ketika musim hujan. Dikarenakan, persediaan pasir itu langka ketika musim hujan dan penambang pasir menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Dalam praktek jual beli seperti ini dalam Islam tidak diperbolehkan dikarenakan Islam menentang keras sifat *ananiyah* (egois) yang dapat merugikan orang lain dan ketamakan pribadi untuk menumpuk kekayaan atas biaya orang lain untuk memperkaya pribadi kendati barang tersebut sedang dibutuhkan masyarakat. Dalam QS. An-nisa [4]: 29, Allah SWT melarang manusia memakan harta sesama mereka secara batil, seperti cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya. Jika tujuan menimbun untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih, maka keuntungan yang didapat sama dengan riba karena mengambil keuntungan

diatas keuntungan pihak pembeli yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan.

2. Pandangan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Pasal 29 ayat (1) tentang Perdagangan bahwa penambang pasir Gilang Jaya dan penambang pasir Rama Putra Jaya Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang, sudah melanggar ketentuan undang-undang perdagangan dimana sudah menyimpan barang kebutuhan masyarakat dengan jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas sehingga salah satu pihak dirugikan yaitu pihak konsumen dalam undang-undang ini, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga dipasaran.

B. Saran

1. Bagi para pedagang, hendaklah menjalankan aktifitas ekonominya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang tidak merugikan salah satu pihak.
2. Kepada konsumen untuk mengontrol berbagai kegiatan ekonomi, terhadap para pelaku ekonomi itu sendiri, agar sesuai dengan menjalankan aktifitasnya sesuai ajaran Islam.
3. Kepada penegak hukum yang diberikan wewenang Negara, hendaklah menjalankan fungsinya menindak tegas terhadap pelaku penimbunan terhadap barang oleh pedagang yang dibutuhkan masyarakat dalam aktifitas ekonominya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim O. S, Adiwarman. (2015). *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, A. M.-D. (2003). *Buhuts Fi Fiqh Al- Mu'amalat Al-Maliyah Al- Mu'ashirah*. Jeddah: Dar Al- Basyair Al- Islamiyyah.
- Ali, M. (2000). *Hukum Menimbun Barang Dagangan*. Jakarta: Gresik.
- Ali, M. D. (1991). *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Renika Cipta.
- Asikin, Z. (2013). *Hukum Dagang* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Chaudhry, M. S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam* . Jakarta: Renadamedia Group.
- Efa Rufadiah, Cik Hasan. (2002). *Metode Penelitian Agama Dan Dinamika Sosial Himpunan Rencana Penelitian* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fatah, A. B. (1999). *Kamus Al-Bisri Indonesia Arab-Arab Indonesia* . Malang: Pustaka Progresif.
- Fauzia, I. Y. (2014). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hasan, Ali. (2011). *Tarjamah Bulughul-Maram*. Bandung: Di Ponegoro.
- Haroen, N. (2000). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, E. (2015). *Fiqih Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Husaini, I. H. (2010). *Asbabul Wurud*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Ibnu Hamzah Al Husaini, I. H. (2010). *Asbabul Wurud*. Jakarta: Kalam Mulia,.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi Dalam Perespektif Hadis Nabi* . Jakarta: Premadia Group.
- Indonesia, P. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia., P. (2015). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nmor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Isnaini Harahap, Y. S. (2015). *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ja'far, H. A. (2016). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing.
- Kadir. (2013). *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.
- Falah.
- Manan, M. A. (2001). *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mu' Ammal Hamidy, I. A. (1374). *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*. Surabaya: Pt Bina Ilmu Offset.
- Muhammad, A. A. (2010). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Penerbit Amzah.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Mumalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasional, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Qardhawi, S. M. (1993). *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Pt. Bina Ilmu.
- Rajafi, A. (2013). *Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Printing Cemerlang.
- Ri, D. A. (2010). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lautan Lestari.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, S. (1997). *Fiqh Sunnah, Jilid 12*. Bandung: Alma'arif.
- Setiawan, W. (2013). *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah.
- Shiddieqy, H. A. (1997). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Soeprapto, M. F. (2006). *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.

Sohari Sahrani, Ru'fah. A. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Suhendi, H. (2004). *Fiqih Muamalah* . Jakarta: Rajawali Pers.

Sunggono, B. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syarifuddin, A. (1997). *Usul Fiqh, Jilid I, Cetak I*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.

Tika, M. P. (2006). *Metodologi Riset Bisnis* . Jakarta: Pt Bumi Kasara.

Sumber Jurnal

Eka Nuraini Rachmawati, A. M. (2015). Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Dipasar Modal Indonesia. *Jurnal Al-Adalah, XII*, 786. (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2016), h.786. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (20 juli 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Norvadewi. (2016). Bisnis Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Al-Tijary 35*, (Samarinda: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Samarinda, 2016), h. 35 (on-line), tersedia di https://www.researchgate.net/publication/305884774_bisnis_dalam_perspektif_islam_telaah_konsep_prinsip_dan_landasan_normatif (2 oktober 2019), dapat pertanggung jawabkan secara ilmiah.

Sumber internet

<https://setkab.go.id/inilah-perpres-penetapan-dan-penyimpanan-barang-kebutuhan-pokok-dan-barang-penting/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2019.

<https://www.sejasa.com/blog/daftar-harga-pasir-terbaru/> diakses pada tanggal 12 Juli 2019.